

**ANALISIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM
PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA TAMAN SAREH KABUPATEN
SAMPANG TAHUN 2017**

(Studi di Desa Taman Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata
1 (S1) Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Brawijaya
Dengan Minat Utama Reformasi Pemerintahan**

Disusun Oleh:

MUHAMMAD ARIF RACHMATULLAH

125120600111031



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2018

**ANALISIS PROGAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENGENTASAN
KEMISKINAN DI DESA TAMAN SAREH KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2017**
(Studi di Desa Taman Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Muhammad Arif Rachmatullah

NIM. 125120600111031

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing :

Pembimbing Utama



Fathur Rahman, S.IP., MA
NIP. 2011098204291001

Pembimbing Pendamping



Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si
NIP. 2016077910241001

**ANALISIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENGENTASAN
KEMISKINAN DI DESA TAMAN SAREH KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2017**

(Studi di Desa Taman Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang)

S K R I P S I

Disusun Oleh:

Muhammad Arif Rachmatullah

NIM. 125120600111031

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian kompre Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tanggal 13 November 2018

Tim Penguji :

Ketua Majelis Penguji



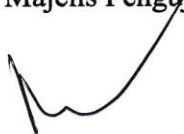
Andi Setiawan, S.IP., M.Si
NIP. 2013048708211001

Sekretaris Majelis Penguji



Ruth Agnesia Sembiring, S.Sos., MA
NIP. 2016077910241001

Anggota Majelis Penguji I



Fathur Rahman, S.IP., MA
NIP. 2011098204291001

Anggota Majelis Penguji II



Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si
NIP. 2016077910241001

Malang, 13 November 2018



Dekan

Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak
NIP. 196908141994021001

PERNYATAAN

Nama : Muhammad Arif Rachmatullah
NIM : 125120600111031

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **ANALISIS PROGAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA TAMAN SAREH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 (Studi di Desa Taman Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 13 November 2018
Yang membuat pernyataan



Muhammad Arif Rachmatullah
NIM. 125120600111031

ABSTRAK

Muhammad Arif Rachmatullah, 2018 : Analisis Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Taman Sareh Kabupaten Sampang Tahun 2017 (Studi di Desa Taman Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang)

Dosen Pembimbing: Fathur Rahman S.IP., M.A dan Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si

Kemiskinan sampai saat ini masih menjadi permasalahan nasional negara Indonesia. Pada bulan Maret 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen). Jumlah tersebut tersebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia dengan angka yang berbeda, salah satunya di Kabupaten Sampang yang tingkat kemiskinannya paling tinggi di Jawa Timur dengan persentase sebesar 27,9% dari total jumlah penduduknya. Sebagai wujud perhatiannya dalam penanganan masalah kemiskinan, pemerintah mempunyai kebijakan-kebijakan dalam pengentasan kemiskinan, salah satunya adalah kebijakan PERMENSOS No 1 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengentasan kemiskinan melalui program PKH 2017, dan menganalisis upaya alternatif dalam mengatasi hambatan dari implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program PKH di Kabupaten Sampang lebih khususnya di Desa Taman Sareh. Penelitian ini menggunakan teori Kemiskinan Robert Chamber serta menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program keluarga harapan di Kabupaten Sampang dinilai belum cukup berhasil karena masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, selain itu masih terdapat masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan program PKH yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sampang bantuannya masih belum merata. Selain itu juga kurangnya pengawasan pendamping PKH terhadap KPM, sehingga masih ada temuan KPM yang masih belum mengerti cara penggunaan ATM dan penyalahgunaan dana bantuan tersebut.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan Publik, Kemiskinan, Program Keluarga Harapan, Government.

ABSTRACT

Muhammad Arif Rachmatullah, 2018: An Analysis of Program Keluarga Harapan in Poverty Reduction in Taman Sareh Village, Sampang Regency, 2017 (A Study in Taman Sareh Village, Sampang District, Sampang Regency)

Advisors: Fathur Rahman S.IP., M.A and Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si

Nowadays, poverty is still becoming a national problem in Indonesia. On March 2017, the number of poor people is reaching to 27,77 million people (10,64% of Indonesians) which is separated in the various regions, for example: Sampang district. Sampang district is one of the highest number of poor people in East Java which is 27,9% of the population. As a handling method, the government has policies in reducing poverty, one of the policies is the social's policy regulation (PERMENSOS) No. 1 Year 2017 about Program Keluarga Harapan (PKH). Furthermore, this research is aimed to analyze the poverty reduction policy through PKH 2017, and analyze an alternative effort in overcoming obstacles from the implementation of poverty reduction policy through PKH in Sampang Regency, especially in Taman Sareh village. This research uses the Robert Chamber Poverty theory and uses descriptive research methods with qualitative approaches. The implementation of poverty alleviation policies through PKH in Sampang District is considered not successful enough because there are still obstacles in its implementation, besides that there are still poor people who have not received assistance, this can be seen from the implementation of the PKH program implemented by the Sampang District government, the assistance is still not evenly distributed. In addition, there is also a lack of PKH escort supervision of KPM, so there are still findings from KPM who still do not understand how to use ATMs and misuse of these funds.

Key Words: Public Policy Analysis, Poverty, Program Keluarga Harapan, Government.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin. Rasa syukur dan bahagia penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan kuasa dan izin-Nyalah penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Taman Sareh Kabupaten Sampang (Studi di Desa Taman Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang), yang disusun oleh peneliti untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan Minat Reformasi Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang.

Pada proses pembuatan proposal, penelitian, hingga penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan begitu banyak bantuan dan dukungan yang diberikan oleh orang sekitar yang begitu berarti bagi penulis. Maka dari itu, sebagai bentuk penghargaan bagi mereka, penulis juga menyampaikan ribuan terimakasih kepada:

1. Allah SWT karena limpahan rahmat taufik, Anugerah dan hidayahNya saya dapat menyelesaikan skripsi dan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan skripsi ini.
2. Kedua orang tua yang selalu memberikan doa dan dukungan yang terbaik dan tidak pernah putus asa untuk menyemangati.
3. Bapak Joko Purnomo S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.
4. Bapak Fathur Rahman, S.IP., M.A dan Bapak Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah sabar memberikan segala masukan, arahan hingga laporan penelitian skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Andi Setiawan, S.IP., M.Si dan Ibu Ruth Agnesia Sembiring, S.Sos., M.A selaku majelis penguji yang telah memberikan banyak kritik saran dan masukan hingga skripsi itu dapat terselesaikan.
6. Kepada Seluruh dosen dan Staf Program Studi Ilmu Pemerintahan atas segala ilmu dan pengalaman, waktu yang diberikan kepada penulis selama aktif sebagai mahasiswa.

7. Kepada Dinas Sosial Kabupaten Sampang, Bapak Syamsul Hidayat dan staff yang telah memberikan data dan informasi dalam penulisan skripsi.
8. Kepada UPPKH Kabupaten Sampang, yang telah memberikan data dan informasi sehingga dapat membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.
9. Kepada Kepala Desa Taman Sareh, yang telah memberikan data dan informasi sehingga dapat membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.
10. Niken Lusiyana Dewi, Terima kasih sudah memberikan motivasi, dukungan, membantu, dan mendoakan penulis dalam banyak hal, terutama dalam penyelesaian skripsi. Banyak saran dan masukan yang diberikannya untuk kemajuan penulis.
11. Keluarga seperjuangan mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UB 2012 atas segala dukungan dan kebersamaan selama ini.
12. Pihak lainnya yang juga turut membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam proses penyusunan laporan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak sehingga dapat lebih bermanfaat.

Malang, 13 November 2018

Muhammad Arif Rachmatullah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Akademis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	9
BAB II KAJIAN TEORI	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Teori Kemiskinan Menurut Robert Chambers	14
2.2.1 Jebakan Kemiskinan.....	16
2.2.2 Penyebab Kemiskinan.....	19
2.2.3 Jenis Kemiskinan	20
2.2.4 Apa Yang Seharusnya Dilakukan	21
2.2.4.1 Prioritas Kaum Miskin	22
2.2.4.2 Rumusan Tujuan Bagi Orang Luar	23
2.2.4.3 Analisa Kegiatan	24
2.2.4.4 Kekuasaan dan Golongan Miskin	26

2.3 Alur Fikir Penelitian.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Lokasi Penelitian.....	30
3.3 Fokus Penelitian	31
3.4 Jenis Data	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.5.1 Wawancara.....	33
3.5.2 Studi Pustaka.....	36
3.6 Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	39
4.1 Kondisi Sosial Desa Taman Sareh	39
4.2 Aktor-Aktor Pelaksanaan Kebijakan.....	41
4.2.1 Menteri Sosial Republik Indonesia	43
4.2.2 Dinas Sosial Kabupaten Sampang	44
4.2.3 Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH).....	46
4.2.3.1 Koordinator PKH.....	46
4.2.3.2 Pendamping PKH.....	46
BAB V PEMBAHASAN	48
5.1 Pelaksanaan PKH di Desa Taman Sareh Kabupaten Sampang	49
5.1.1 Pembiayaan dan Pilihan	51
5.1.1.1 Perekrutan Pelaksana PKH	51
5.1.1.2 Koordinasi PKH Dalam Pelaksanaan PKH di Desa Taman Sareh	53
5.1.1.3 Penyaluran Dana Bantuan Melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI)....	55
5.1.1.4 Komitmen dan Sanksi Terhadap KPM PKH	56
5.1.2 Penyebab Kendala.....	57
5.1.2.1 Pola Pikir Masyarakat	57
5.1.2.2 Minimnya Pengetahuan Teknologi	59
5.1.2.3 Penyaluran Dana Bantuan Yang Tidak Merata.....	60
5.1.2.4 Tenaga Kerja Pendamping PKH Merangkap Jabatan.....	60
5.1.3 Menemukan dan Menciptakan Peluang	61
5.1.3.1 Edukasi Penggunaan Dana Bantuan PKH	62

5.1.3.2 Sosialisasi PKH Terhadap Masyarakat Desa Taman Sareh Oleh LSM	63
5.1.4 Kelayakan Politis	64
5.1.4.1 Faktor Pendukung Pelaksanaan PKH di Desa Taman Sareh	64
5.1.4.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan PKH di Desa Taman Sareh	66
BAB VI PENUTUP	68
6.1 Kesimpulan	68
6.2. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penerima Bantuan PKH Kecamatan Sampang.....	7
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	12
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	35



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Jebakan Kemiskinan.....	18
Bagan 2.2	Alur Fikir Penelitian.....	27
Bagan 3.1	Model Interaktif Miles Dan Huberman.....	38
Bagan 5.1	Alur Perekrutan Pelaksana PKH.....	52



DAFTAR ISTILAH

BINTAP	: Bimbingan dan Pemantapan adalah proses pendidikan atau bimbingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sampang terhadap tenaga kerja Pendamping
BLT	: Bantuan Langsung Tunai adalah Bantuan yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan tunai terhadap masyarakat yang membutuhkan.
Dinsos	: Dinas Sosial adalah Perangkat kerja satuan daerah yang bergerak di bidang masalah sosial.
FASKES	: Fasilitas Kesehatan adalah Bentuk layanan pemerintah berupa kesehatan yang diberikan kepada perorangan.
KPM	: Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan dari Pemerintah
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh kelompok untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat secara sukarela.
PELIR	: Penyambung Lidah Masyarakat adalah sebagai alat penghubung untuk aspirasi masyarakat terhadap Pemerintah.
PKH	: Program Keluarga Harapan adalah Program pemerintah terhadap masyarakat miskin dalam rangka pengentasan kemiskinan.
PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya
PNS	: Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri yang bekerja dibawah naungan pemerintah.

DAFTAR SINGKATAN

ATM	: Anjungan Tunai Mandiri
BINTAP	: Bimbingan dan Pemantapan
BLT	: Bantuan Langsung Tunai
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BPS	: Badan Pusat Statistik
Dinsos	: Dinas Sosial
FASKES	: Fasilitas Kesehatan
GPMK	: Gerakan Perang Melawan Kemiskinan
IDM	: Indeks Desa Membangun
KEMENSOS	: Kementerian Sosial
KPM	: Keluarga Penerima Manfaat
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
PKH	: Program Keluarga Harapan
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
PLD	: Pegawai Lokal Desa
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PT	: Perseroan Terbatas
RTSM	: Rumah Tangga Sangat Miskin
RI	: Republik Indonesia
SDM	: Sumber Daya Manusia
TUPOKSI	: Tugas Pokok dan Fungsi
UMK	: Upah Minimum Kerja

UPPKH : Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fungsi penyelenggaraan pemerintahan yakni menciptakan suatu fungsi pelayanan publik. Pemerintahan yang baik cenderung menciptakan terselenggaranya fungsi tersebut dengan baik pula, sebaliknya pemerintahan yang buruk mengakibatkan fungsi pelayanan publik tidak dapat terselenggara dengan baik. Selanjutnya yang menjadi salah satu titik penting dalam pelayanan publik adalah ketika pelayanan atau kebijakan diimplementasikan ke masyarakat. Kebijakan atau program tersebut diterima dengan baik atau justru menjadi persoalan baru ketika diimplementasikan.

Pada tahap analisis, kebijakan menjadi titik yang krusial dalam lingkup kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat. Dalam proses atau praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. Akibatnya, pada tingkat abstraksi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur

dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang publik, dan keputusan yudisial.¹

Fokus dari pembahasan tentang penelitian ini adalah tentang pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Sampang, Jawa Timur terutama di Desa Taman Sareh Kecamatan Sampang melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Dimana secara data statistik mengatakan bahwa Kabupaten Sampang pada tahun 2018 ini masih memimpin sebagai daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Seperti yang di katakan oleh Kasi Sosial Statistik BPS Sampang Nur Amin Setiawan mengatakan bahwa:²

“Angka kemiskinan menurun sampai 23,56 persen dari jumlah penduduk 900 ribu jiwa lebih, ada 225,13 ribu jiwa yang tergolong miskin. Meskipun ada penurunan, angka kemiskinan di Sampang masih menempati posisi tertinggi se-Jawa Timur.”

Salah satu penyebab kemiskinan di Kabupaten Sampang adalah karena sebagian penduduk miskin rata-rata bekerja sebagai petani. Sementara, lahan di sektor pertanian semakin menyusut dan terus berkurang. Belum lagi persoalan air. Di Sampang, masyarakat yang membutuhkan air masih mengandalkan curah hujan.

Kemiskinan diartikan sebagai suatu di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Menurut sejarah, keadaan kaya dan miskin secara berdampingan tidak merupakan masalah sosial sampai saatnya perdagangan berkembang dengan pesat

¹ Riant Nugroho, 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, hlm, 147-14

² <https://www.jawapos.com/radarmadura/read/2018/01/17/40994/angka-kemiskinan-sampang-tertinggi-di-jawa-timur> di akses pada tanggal 31 Januari 2018.

dan timbulnya nilai-nilai sosial³. Dengan berkembangnya perdagangan ke seluruh dunia dan ditetapkannya taraf kehidupan tertentu sebagai suatu kebiasaan masyarakat, kemiskinan muncul sebagai masalah sosial.

Pada masyarakat modern yang rumit, kemiskinan menjadi suatu masalah sosial karena sikap membenci kemiskinan. Persoalannya adalah karena melihat barang sekunder menjadi bahan primer, misal seseorang dianggap miskin karena tidak memiliki mobil, televisi dan lain sebagainya yang pada akhirnya benda-benda sekunder tersebut dijadikan ukuran bagi keadaan sosial-ekonomi seseorang. Namun untuk persoalan lebih ke pembagian kekayaan yang merata. Berbeda persoalan ketika turut dalam arus urbanisasi, tetapi gagal mencari pekerjaan. Banyak masyarakat urban yang gagal mencari pekerjaan, persoalan bagi mereka adalah kemiskinan disebabkan tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer sehingga timbul tuna karya, tuna sosial dan lain sebagainya. Secara sosiologis, sebab-sebab timbulnya masalah tersebut adalah karena salah satu lembaga kemasyarakatan tidak berfungsi dengan baik, yaitu lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi. Kepincangan tersebut akan menjalar ke bidang-bidang lain, misalnya pada kehidupan keluarga yang tertimpa kemiskinan tersebut.⁴

Kemiskinan sampai saat ini masih menjadi permasalahan nasional negara Indonesia. Pada bulan Maret 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen).⁵ Jumlah tersebut tersebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia dengan angka yang berbeda. Angka kemiskinan tersebut oleh pemerintah juga diklasifikasikan ke dalam daerah perkotaan dan

³ Soerjono Soekanto. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Hlm. 320.

⁴ *Ibid.* Hlm, 320.

⁵ <https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1379> diakses pada 19 Januari 2018.

pedesaan. Kemiskinan memang bukan masalah tunggal, banyak unsur-unsur yang menyebabkan angka kemiskinan itu dapat naik atau turun. Kemiskinan disebabkan oleh tidak sejahteranya kehidupan masyarakat yang tergolong masih tidak mampu dalam menjalani kehidupannya.

Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi program ampuh dari pusat untuk membantu masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan atau secara pengertian memiliki arti merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Program Keluarga Harapan di Kabupaten Sampang sendiri di implementasikan ketika awalnya sebagai suatu kegiatan uji coba di tahun 2007. Selain PKH, program pemerintah yang lain dengan target masyarakat miskin pula yakni adalah BLT (Bantuan Langsung Tunai). Perbedaan PKH dan BLT sendiri adalah bisa dilihat dari proses penyaluran dana bantuan tersebut. Proses penyaluran bantuan PKH dilakukan melalui transfer ke rekening masing-masing KPM melalui BANK BRI, sedangkan BLT proses penyaluran dana tersebut dilakukan secara tunai kepada masing-masing penerima bantuan BLT. PKH dibangun terutama untuk membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas, diantaranya fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik). Kemudian manfaat PKH didorong untuk dinikmati bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden Republik Indonesia.⁶

⁶ <https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan> diakses pada 19 Januari 2018.

Konteks kemiskinan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur menjadi daerah yang menarik untuk diteliti. Dilihat dari data BPS tahun 2015 menempatkan Kabupaten Sampang menjadi Kabupaten yang mencapai angka kemiskinan cukup tinggi di Provinsi Jawa Timur dengan persentase sebesar 27,9% dari total jumlah penduduknya. Kemudian disusul kabupaten sebelahnya yakni Kabupaten Bangkalan dengan persentase 24,7%. Kabupaten Sampang menempati urutan pertama dengan jumlah persentase kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Data BPS rentan waktu 2012-2013 angka kemiskinan menurun, tahun 2012 mencapai 27,88% atau setara dengan jumlah penduduk sebanyak 252.600 dari total jumlah penduduk yakni 906.025. sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan dengan persentase 26,97% atau dengan jumlah penduduk sebanyak 247.201 dari total penduduk 916.577 jiwa. Lain halnya pada tahun 2014, angka kemiskinan mengalami kenaikan sebesar satu persen⁷. Selain itu salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah pendidikan, latar belakang pendidikan di Desa Taman Sareh adalah mayoritas Lulusan SD. Rata-rata penduduk Desa Taman Sareh berprofesi sebagai petani. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Musemmil selaku Kepala Desa Taman Sareh:⁸

“Desa Taman Sareh terdapat 5.610 jiwa penduduk dari total jumlah tersebut terdapat 1.731 penduduk miskin. Disini mayoritas tingkat pendidikan masyarakat Desa Taman Sareh adalah hanya lulusan Sekolah Dasar dan rata-rata pekerjaannya adalah sebagai petani. Petani disini mempunyai penghasilan yang tidak cukup banyak bahkan dikatakan sedikit karena hanya menghasilkan sekitar Rp. 500.000,00 sampai dengan Rp. 800.000,00. perbulan ”

⁷ www.lintasmaduranews.com/2015/10/kemiskinan-di-kabupaten-sampang.html. Di akses pada 20 Januari 2018.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Musemmil selaku Kepala Desa Taman Sareh. Tanggal 18 November 2018; pukul 10.15.

Jumlah penduduk Desa Taman Sareh 5.610 jiwa, dari total jumlah penduduk tersebut terdapat 1.731 penduduk miskin. Mayoritas masyarakat Desa Taman Sareh berprofesi sebagai petani. Latar belakang pendidikan masyarakat Desa Taman Sareh adalah lulusan Sekolah Dasar. Profesi petani di Kabupaten Sampang Desa Taman Sareh menghasilkan Rp. 500.000,00 sampai dengan Rp. 800.000,00 perbulan. Tentunya penghasilan tersebut kurang dari cukup apabila dibandingkan dengan kebutuhan pokok sehari-hari yang di konsumsi.

Penerima bantuan PKH di tahun 2018 yaitu sebanyak 72.983 KPM.⁹ Ini artinya berbanding lurus dengan angka kemiskinan dan jumlah penerima PKH di Kabupaten Sampang. Di Kabupaten Sampang terdapat tenaga pendamping PKH yang merangkap jabatan di lembaga yang berbeda yakni 55 pendamping dari total 186.¹⁰ Rangkap jabatan selama menjadi tenaga pendamping PKH tidak dibenarkan menurut Surat Kementerian Sosial Republik Indonesia No. 249/LJS.JS/BLTB/07/2014¹¹ tentang kriteria rangkap pekerjaan bagi pegawai kontrak pelaksana PKH di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sebaliknya di Kabupaten Sampang terdapat data yang mengejutkan. Rangkap jabatan yang di maksud adalah menjadi Pendamping Lokal Desa (PLD) masih aktif di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Guru atau di luar PKH.

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, peneliti menjatuhkan pilihan di Desa Taman Sareh Kecamatan Sampang dengan alasan bahwa berdasarkan data dari UPPKH Kabupaten Sampang Desa Taman Sareh merupakan desa yang masyarakatnya paling banyak menerima bantuan PKH di

⁹ UPPKH Kabupaten Sampang 2018

¹⁰ <https://mediamadura.com/2017/09/15/pendamping-desa-di-sampang-rangkap-jadi-pkh/>, Diakses pada tanggal 4 Februari 2018.

¹¹ Surat Kementerian Sosial Republik Indonesia No. 249/LJS.JS/BLTB/07/2014. Di akses pada tanggal 4 Februari 2018.

Kecamatan Sampang. Data dari UPPKH Kabupaten Sampang 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Penerima Bantuan PKH Kecamatan Sampang

No	Desa/ Kelurahan	KPM
1	TAMAN SAREH	713
2	PULAU MANDANGIN	664
3	BARUH	541
4	PEKALONGAN	540
5	GUNUNG MADDAH	512

Sumber : UPPKH Kabupaten Sampang Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Desa Taman Sareh merupakan desa dengan jumlah tertinggi penerima bantuan PKH di Kecamatan Sampang yang berjumlah 713 KPM. Pada urutan ke dua yakni Desa Pulau mandangin dengan mencapai angka 664 KPM, pada urutan ke 3 yakni Desa Baruh dengan mencapai angka 541 KPM, kemudian pada urutan ke 4 yakni Desa Pekalongan dengan mencapai angka 540 KPM, dan pada urutan ke 5 yakni Desa Gunung Maddah dengan mencapai angka 512 KPM.

Pada akhirnya, untuk itu peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema tersebut dan dengan judul “**Analisis Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Taman Sareh Kabupaten Sampang Tahun 2017**” (Studi di Desa Taman Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti mempunyai pertanyaan yang diajukan, yakni :

1. Bagaimana analisis Progam Keluarga Harapan dalam pengentasan kemiskinan di Desa Taman Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung Progam Keluarga Harapan di Desa Taman Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yakni :

1. Untuk mengetahui pengentasan kemiskinan melalui Progam Keluarga Harapan di Desa Taman Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung Progam Keluarga Harapan di Desa Taman Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan dua manfaat, baik manfaat secara akademis maupun manfaat secara praktis.

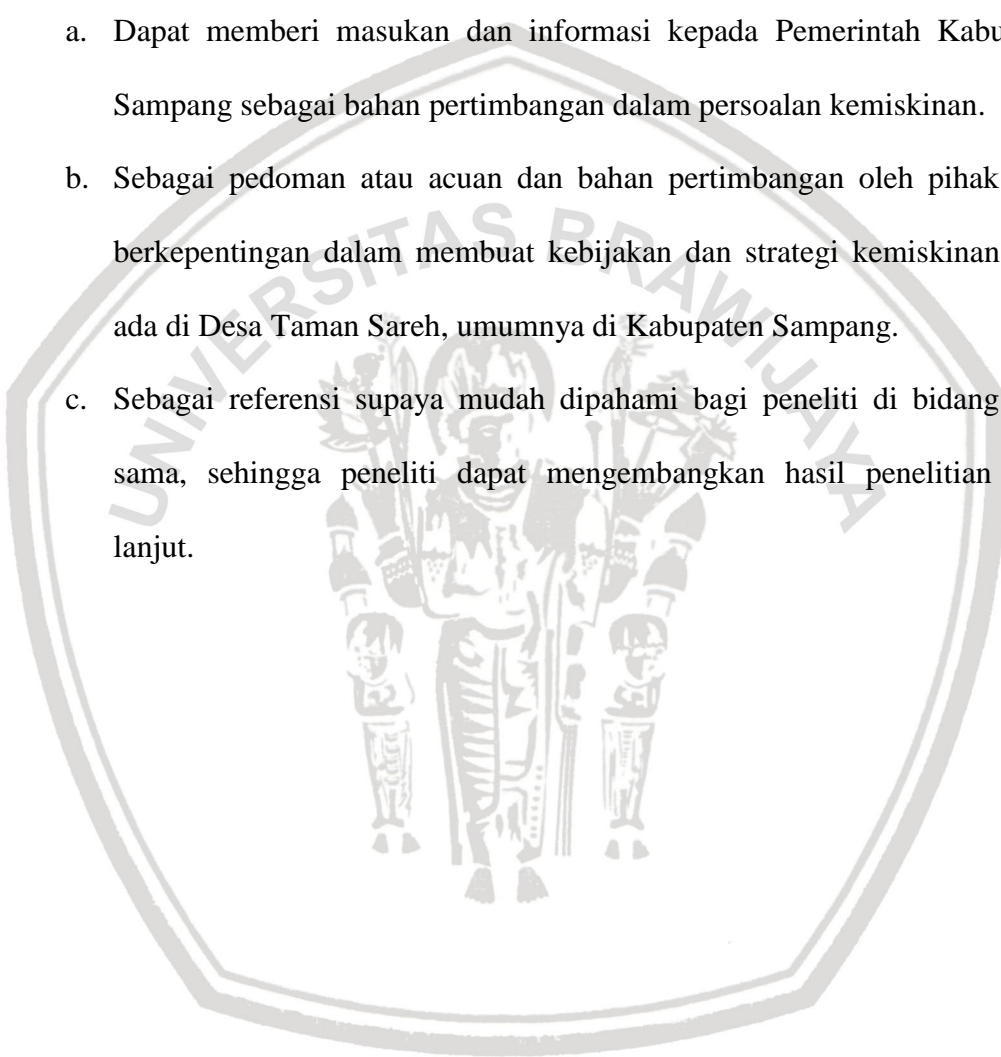
1.4.1 Manfaat Akademis

- a. Sebagai penambah referensi baru tentang persoalan kemiskinan yang kemudian sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat, implementasi dan evaluasi suatu kebijakan.

- b. Memperoleh pengembangan pengetahuan tentang mata kuliah-mata kuliah yang diajarkan di Program Studi Ilmu Pemerintahan seperti kebijakan publik, hubungan pusat dan daerah atau mata kuliah yang berkaitan.
- c. Sebagai pelengkap bagi penelitian yang memiliki tema serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Dapat memberi masukan dan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Sampang sebagai bahan pertimbangan dalam persoalan kemiskinan.
- b. Sebagai pedoman atau acuan dan bahan pertimbangan oleh pihak yang berkepentingan dalam membuat kebijakan dan strategi kemiskinan yang ada di Desa Taman Sareh, umumnya di Kabupaten Sampang.
- c. Sebagai referensi supaya mudah dipahami bagi peneliti di bidang yang sama, sehingga peneliti dapat mengembangkan hasil penelitian lebih lanjut.





BAB II

KAJIAN TEORI

Pada bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka tentang penelitian terdahulu, konsep atau teori penelitian, dan alur fikir penelitian. *Pertama*, penelitian terdahulu disajikan sebagai bahan kajian dari penelitian ini yang dapat dijadikan referensi. *Kedua*, konsep atau teori penelitian disajikan sebagai bahan analisis yang dapat mendukung penelitian. *Ketiga*, alur fikir disajikan sebagai kerangka dalam penulisan skripsi ini.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis menyajikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis, kemudian akan diklarifikasikan berdasarkan judul penelitian, penelitian yang dibahas, titik pembeda, dan disertai dengan penjelasan singkat mengenai penelitian terdahulu tersebut. Adapun penelitian terdahulu dengan tema Kemiskinan yaitu, sebagai berikut:

Pertama, penelitian Susilo dengan judul “Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kediri”. Penelitian ini mengupas persoalan kemiskinan melalui penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SKPD) sebagai upaya mengentaskan kemiskinan yang berdimensi jangka panjang dan menengah. Adapun pembedanya adalah yang menjadi objek penelitian adalah Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kediri dengan fokus pada identifikasi permasalahan kemiskinan sebagai bahan penyusunan SKPD. *Kedua*, penelitian Sanandjihitu Sangadji, Totok Abadi, Luluk Fauiziyah dkk dengan judul “Karakteristik Kemiskinan dan Penanggulangan di Kabupaten

Sidoarjo”. Peneliti menjelaskan karakteristik kemiskinan dan penanggulannya di Kabupaten Sidoarjo dengan pisau analisis *grounded* dari Strauss dan Corbin.

Ketiga, Skripsi Fahmi Rahmad Dani dengan judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004-2015”. Penelitian ini menjabarkan ke dalam tiga poin yakni Pengaruh pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan melalui Produk Domestik Bruto, Upah Minum Kabupaten (UMK), Pengangguran dan Inflasi terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya Penelitian ini berfokus pada pengaruh kondisi ekonomi makro terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. *Keempat*, penelitian Dewi Tirta Sari dengan judul “Strategi Pengentasan Kemiskinan dalam Program Gerakan Perang Melawan Kemiskinan (GPMK) Melalui Pemberdayaan Masyarakat”. Penelitian Dewi Tirta Sari menjelaskan strategi pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Blitar melalui Program GPMK yakni program pemberdayaan masyarakat agar terjadi perubahan yang baik melalui materi ataupun moral. Fokus kajian pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui GPMK.

Terakhir, Endang Retnowati dengan judul penelitian “Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi, Hukum)”. Adapun penelitian ini menjabarkan tentang kemiskinan struktural yang dialami oleh nelayan Indonesia ditandai dengan minim modal, tekanan dari pemilik modal, sistem bagi hasil yang tidak adil, serta tidak adanya jaminan bagi nelayan dalam meningkatkan taraf hidupnya. Kemudian, penelitian ini berfokus pada kemiskinan yang dialami masyarakat nelayan. Sisi lain, penelitian ini pula

menyoroti aspek perlindungan secara hukum. Agar lebih mudah dipahami, di bawah ini tabel 2.1 yang menjelaskan penelitian terdahulu.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Penelitian	Pembeda
1.	Susilo, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang (2009)	Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kediri.	Penelitian mengupas tentang kemiskinan melalui penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SKPD) sebagai upaya mengentaskan kemiskinan yang berdimensi jangka panjang dan menengah. Metode penelitian Kualitatif.	Peneliti melakukan penelitian di lembaga Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kediri dengan fokus pada identifikasi permasalahan kemiskinan sebagai bahan penyusunan SKPD.
2.	Sanandjihitu Sangadji, Totok Abadi, Luluk Fauiziyah, Departemen Ilmu Administrasi Negara FISIP dan Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah (2015)	Karakteristik Kemiskinan dan Penanggulangan di Kabupaten Sidoarjo	Penelitian ini menjelaskan karakteristik kemiskinan serta penaggulangannya di Kabupaten Sidoarjo. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif.	Pada penelitian Sanandjihitu dkk mentelaah penelitian dengan melalui analisis <i>grounded</i> dari Strauss dan Corbin.

3.	Fahmi Rahmad Dani, Mahasiswa Universitas Jember (2015)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004-2015	Penelitian ini menjelaskan tiga poin yakni Pengaruh pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan melalui Produk Domestik Bruto, Upah Minum Kabupaten (UMK), Pengangguran dan Inflasi terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian deskriptif kualitatif.	Penelitian tersebut berfokus pada pengaruh kondisi ekonomi makro terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Sidoarjo.
4.	Dewi Tirta Sari, Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang (2010).	Strategi Pengentasan Kemiskinan dalam Progam Gerakan Perang Melawan Kemiskinan (GPMK) Melalui Pemberdayaan Masyarakat.	Pada penelitian Dewi Tirta Sari menjelaskan strategi pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Blitar melalui Progam GPMK yakni program pemberdayaan masyarakat agar terjadi perubahan yang baik melalui materi ataupun moral. Metode penelitian kualitatif.	Penelitian tersebut fokus kajian pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
5.	Endang Retnowati, Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2011)	Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial,	Penelitian ini mejabarkan tentang kemiskinan structural yang dialami oleh nelayan Indonesia ditandai dengan minim modal, tekanan dari	Penelitian Endang Retnowati berfokus pada kemiskinan yang dialami masyarakat nelayan. Sisi lain, penelitian ini pula

		Ekonomi, Hukum)	pemilik modal, sistem bagi hasil yang tidak adil, serta tidak adanya jaminan bagi nelayan dalam meningkatkan taraf hidupnya. Metode penelitian kualitatif.	menyoroti aspek perlindungan secara hukum.
--	--	-----------------	--	--

Sumber: Olahan Peneliti, 2018.

2.2 Teori Kemiskinan Menurut Robert Chambers

Seperti dijelaskan di latar belakang bahwa Kemiskinan diartikan sebagai suatu di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Penelitian ini menggunakan teori kemiskinan Robert Chambers. Robert Chambers memandang kemiskinan merupakan peristiwa sosio-ekonomi yang ditujukan melalui penggunaan sumberdaya yang ada demi memuaskan keinginan yang sedikit, sedangkan yang banyak kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan sebuah ketimpangan atas penguasaan hak-hak dasar yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat sehingga mengakibatkan keadaan yang serba kekurangan, kerentanan, dan ketidakberdayaan¹². Chambers kemudian membagi pandangan kemiskinan berdasarkan dua kelompok ahli: *pertama*, pandangan pada kelompok ahli ekonomi politik, yaitu pandangan kelompok yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari suatu proses pemusatan kekayaan dan kekuasaan dengan mendahulukan kepentingan golongan menengah perkotaan di atas beban kepentingan golongan miskin di pedesaan. *Kedua*, pandangan pada

¹² Robert Chambers.1983. *pembangunan Desa dari Belakang*. Jakarta:LP3ES.hlm. 46-47

kelompok lingkungan fisik, yaitu pandangan yang melihat kemiskinan disebabkan oleh pertambahan penduduk dan tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup.¹³

Pandangan mengenai kemiskinan sebagai kondisi yang menunjukkan ketidakmampuan sekelompok masyarakat atau individu sebagai akibat dari sifat boros, malas, fatalistik, dan kata bodoh tidak sepenuhnya benar. Menurut Chambers, masyarakat miskin justru memiliki sifat pekerja keras, cerdas dan ulet. Chamber mendeskripsikan dua kondisi kemiskinan pada kelompok masyarakat dan individu sebagai berikut:

“Suatu deskripsi yang dimulai dari 3 kelompok, memberikan keuntungan karena kita dapat membedakan dua macam situasi kemiskinan: *pertama*, kemiskinan kelompok masyarakat secara keseluruhan, disebabkan oleh keberadaannya yang jauh terpencil atau tidak memudahinya sumberdaya atau karena kedua-duanya dan *kedua*, suatu keadaan masyarakat yang di dalamnya terdapat ketimpangan yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin. Sebaliknya, suatu deskripsi yang dimulai dari perseorangan akan memberikan keuntungan pembuktian ketidakadilan yang dialami kaum wanita di hampir semua masyarakat, kadang-kadang diderita sejak lahir”¹⁴.

Konteks kemiskinan di Kabupaten Sampang merupakan apa yang dimaksud Chambers sebagai sebuah kesalahan cara pandang ‘orang luar’, yang dimaksud ‘orang luar’ adalah Pemerintah, birokrat, dan aparatur pemerintahan serta para ilmuwan dalam mengklasifikasikan kemiskinan sehingga terjadi ketidakmerataan distribusi sumber daya yang menciptakan suatu jebakan kemiskinan.

¹³ *Ibid.* hlm.52.

¹⁴ *Ibid.*

2.2.1 Jebakan Kemiskinan

Memahami kemiskinan, peneliti mencoba menggunakan apa yang disebut oleh Robert Chambers sebagai “jebakan kemiskinan”. Jebakan kemiskinan terdiri dari lima faktor yang saling berkaitan yang melihat kehidupan orang lain miskin. Adapun ke lima faktor yang di sebutkan oleh Robert Chambers adalah sebagai berikut¹⁵:

Pertama, kemiskinan. Kemiskinan merupakan faktor yang paling menentukan dibandingkan faktor-faktor lainnya. Kemiskinan seperti kondisi kekurangan akibat tidak memiliki pendapatan guna memenuhi kebutuhannya dan memiliki pengaruh saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat miskin diantaranya ketertindasan oleh pemilik modal, serangan penyakit, dikucilkan, dan rawan terhadap keadaan darurat. Kemiskinan mengakibatkan kelemahan jasmani karena kekurangan makan, yang pada gilirannya menghasilkan kondisi fisik yang lemah dan keterpurukan kesehatan namun di sisi lain tidak memiliki biaya untuk melakukan pengobatan. Kemiskinan mengakibatkan keterkucilan karena posisi yang rendah karena pendapatan yang rendah, sehingga tidak memiliki suara di dalam masyarakat. Konsep kemiskinan yang dimaksud tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan tetapi juga yang telah memiliki pendapatan.

Kedua, kelemahan fisik merupakan faktor yang menyebabkan ketergantungan atas kemampuan mendapatkan pendapatan berikut kekuatan sosial. Masyarakat dengan kelemahan fisik tidak memiliki solusi yang menyangkut dengan penciptaan atau peningkatan pendapatan baru. Bantuan dari

¹⁵ *Ibid.* hlm.145-148.

pihak lain sangat diharapkan oleh masyarakat miskin dalam mengatasi persoalan-persoalan terkait kebutuhan akan sumber pendapatan.

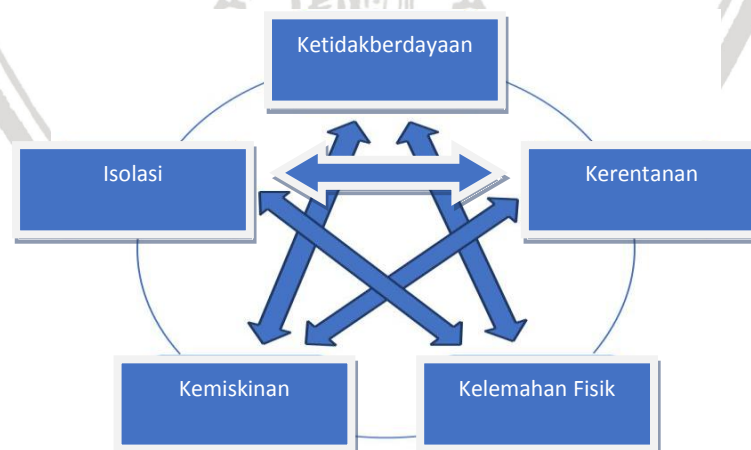
Ketiga, isolasi atau keterasingan merupakan dimensi yang terkait dengan lokasi tempat tinggal masyarakat miskin sebagai penyebab kemiskinan yang berhubungan dengan keterbatasan yang dialaminya. Faktor ini menganggap adanya kegiatan pembangunan pusat-pinggiran sehingga terjadi ketimpangan yang menyebabkan fasilitas berupa infrastruktur maupun bantuan dari pemerintah tidak dapat dijangkau oleh masyarakat. Dimensi isolasi juga menunjukkan adanya hubungan dengan para pemimpin politik serta bantuan hukum dan keterbatasan informasi.

Keempat, kerentanan merupakan salah satu faktor yang paling banyak memiliki hubungan dengan faktor lainnya yakni, kondisi dimana lemahnya kemampuan seseorang dalam mengatasi keadaan darurat yang menuntut ketersediaan sumberdaya secara tidak terduga kemudian tidak sanggup terpenuhi. Kerentanan dapat dilihat dari ketidakmampuan dari keluarga miskin untuk menyediakan sesuatu dalam menghadapi kondisi darurat. Keadaan darurat yang dimaksud adalah adanya bencana alam, bencana kemanusiaan, serangan penyakit, dan berbagai keadaan darurat lainnya. Alokasi sumberdaya berupa pendapatan merupakan kunci utama yang menjadi penyebab kerentanan. Faktor kerentanan sering menimbulkan roda penggerak kemiskinan yang mendesak keluarga miskin menjual harta benda yang paling berharga untuk kebutuhan konsumsi sehingga keluarga tersebut semakin dalam masuk ke lubang kemiskinan.

Kelima, ketidakberdayaan merupakan faktor yang mendapatkan sorotan tinggi terutama karena dampaknya dalam mendorong terjadinya proses kemiskinan atau pemiskinan. Pada lain hal ketidakberdayaan juga dapat berarti terbatasnya akses orang miskin terhadap bantuan pemerintah karena posisinya yang lemah dalam tatanan masyarakat sehingga mendorong kondisi kemiskinan semakin parah. Kondisi tersebut menempatkan orang miskin sebagai pihak yang selalu dirugikan dalam setiap kegiatan transaksi jual-beli maupun pengambilan keputusan terkait pelayanan dan bantuan yang disediakan oleh pemerintah. Faktor ini mendorong kelemahan jasmani, karena waktu dan tenaga dicurahkan untuk memperoleh akses karena tenaga digunakan untuk memenuhi kewajiban yang lain.

Faktor-faktor tersebut dirancang dalam sebuah skema agar dapat mendeteksi hubungan saling mempengaruhi di dalamnya, skema tersebut disajikan sebagai berikut:

Bagan 2.1
Jebakan Kemiskinan



Sumber: Robert Chambers, 1983, Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang, Jakarta: LP3ES. hlm. 145

Kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa kemiskinan merupakan hubungan kausal (timbal-balik) antara satu faktor dengan faktor lainnya yang kemudian membentuk jaringan jebakan kemiskinan. Kemiskinan di daerah Kabupaten seperti Kabupaten Sampang termasuk dalam dimensi ketidakberdayaan serta kerentanan yang ditandai dengan permasalahan ketepatan sasaran pada tumpang tindih program yang menyebabkan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sampang belum berjalan efektif dan efisien.

2.2.2 Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan disebabkan karena berbagai kondisi yang tidak memungkinkan masyarakat miskin meningkatkan taraf hidupnya. Ada empat bentuk kemiskinan menurut Robert Chambers, antara lain :¹⁶

1. Kemiskinan absolut: apabila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan berkerja.
2. Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum merata menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
4. Kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumberdaya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.

¹⁶ Ali Khosan, dkk. 2015. *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm. 3-4

Berdasarkan permasalahan pada Kabupaten Sampang dapat disimpulkan bahwa penyebab utama dari kemiskinan yang terjadi adalah kemiskinan struktural yang di tunjukan dari kelamahan ketetapan sasaran akibat dari lemahnya akurasi ketersediaan data berserta instrumen pelaksanaan progam dan penggunaan anggaran yang belum efektif dan efisien.

2.2.3 Jenis Kemiskinan

Kemiskinan memiliki jenis-jenis yang terbentuk berdasarkan penyebab dari terjadinya kemiskinan. Pada tulisan Jazairy dalam Mohtar menjelaskan beberapa jenis kemiskinan, diantaranya :¹⁷

- a. Kemiskinan “*interstitial*”. Kondisi deprivasi materiil dan alienasi mendorong timbulnya kantong-kantong kemiskinan yang dikelilingi oleh para pemilik kekayaan, kekuasaan dan asset lain yang besar. Dalam kondisi seperti ini sulit untuk melakukan intervensi untuk penanggulangan kemiskinan tanpa diselewengkan oleh mereka yang tidak miskin itu.
- b. Kemiskinan perifer. Kemiskinan terdapat di wilayah-wilayah pinggiran dan terjadi akibat deprivasi materiil yang berlangsung dalam keadaan isolasi dan alienasi.
- c. Kemiskinan “*overcrowding*”. Deprivasi materiil akibat desakan kependudukan dan kelangkaan sumberdaya akan mendorong timbulnya alienasi dan kemiskinan jenis ini.
- d. Kemiskinan sporadik atau traumatik, kemiskinan yang timbul akibat kerentanan terhadap bencana alam (misalnya, kemarau panjang), hilangnya lapangan pekerjaan dan ketidaknyamanan yang mungkin sementara tapi seringkali berkembang endemik.
- e. Kemiskinan endemik. Bisa timbul akibat isolasi, alienasi, deprivasi teknologi, ketergantungan dan kelangkaan asset.

Pemaparan mengenai jenis kemiskinan tersebut kemudian dapat dipersempit menjadi dua jenis kemiskinan, yaitu:

¹⁷ Mohtar Mas’oed. 1997. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm.144-145

- a. Kemiskinan alamiah. Kemiskinan ini berkaitan dengan kelangkaan sumberdaya alam dan prasarana umum, serta penggunaan teknologi yang rendah
- b. Kemiskinan buatan dihubungkan dengan dampak dari sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Jenis kemiskinan yang dapat Kabupaten Sampang berdasarkan diagnosis kemiskinan yang telah dipaparkan adalah jenis kemiskinan alamiah yang berasal dari permasalahan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang.

2.2.4 Apa Yang Seharusnya Dilakukan

Pada proses menentukan langkah-langkah dalam menanggulangi kemiskinan terutama oleh Pemerintah dan 'orang luar' lainnya, peneliti menggunakan cara-cara menurut Robert Chambers sebagai pedoman dalam menganalisis pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang yakni melalui PKH diantaranya sebagai berikut :¹⁸ *Pertama*, belajar dari urutan prioritas dan strategi masyarakat desa miskin itu sendiri mengenai kebutuhan hidupnya; *kedua*, merumuskan tujuan pembangunan dengan mendahulukan hasrat dan keinginan kaum miskin. *Ketiga*, analisa kegiatan pembangunan melalui analisa pembiayaan dan pilihan, penyebab kendala, kesempatan dan kelayakan politis. *Keempat*, hubungan kekuasaan dan golongan miskin. Agar langkah-langkah tersebut dapat dipahami akan jabarkan sebagai berikut.

¹⁸ Robert Chambers. *Op. Cit.* hlm. 178

2.2.4.1 Prioritas Kaum Miskin

Sikap menghargai orang miskin beserta yang mereka dambakan dapat menghindari kesalahan klasifikasi oleh kaum pelaksana kebijakan. Arus balik dalam proses ini berimplikasi bahwa Pemerintah atau pelaksana kebijakan hendaklah tidak memulai dengan prioritas yang ditentukannya sendiri, melainkan beranjak dari prioritas orang yang miskin tanpa kehilangan kesadaran bahwa segala sumberdaya yang dirasakan manfaatnya oleh kaum miskin adalah mutlak berdasarkan keinginan mereka tanpa ada proyeksi nilai-nilai kepentingan pihak luar selain masyarakat miskin sendiri.

Terdapat tiga cara yang dikemukakan Chambers dalam mengetahui prioritas masyarakat miskin:¹⁹

- a. Pendekatan langsung, melalui wawancara dua arah yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan masyarakat miskin terutama dalam upaya melangsungkan hidupnya dengan perhatian penuh dan sifat saling memahami satu sama lainnya.
- b. Pendekatan tidak langsung, membaca dan mempelajari hasil penelitian para ilmuwan sosial terhadap karakteristik dan perilaku masyarakat miskin berdasarkan sumberdaya wilayah yang tersedia.
- c. Pendekatan melalui dialog yang terbuka dan terus terang dengan orang miskin sambil mempelajari prioritas-prioritas mereka.

Dalam memahami kehidupan mereka Pemerintah tidak boleh lupa akan faktor-faktor yang memberikan dampak yang berbeda-beda dan yang disebabkan oleh perbedaan lingkungan dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Sampang perlu memahami prioritas kebutuhan masyarakat miskin dalam menentukan jenis program-program penanggulangan kemiskinan yang layak diberikan dan masyarakat miskin mana yang layak menerima manfaat program yang telah ditentukan.

¹⁹ *Ibid.*

2.2.4.2 Rumusan Tujuan bagi Orang Luar

Salah satu tujuan yang perlu ditekankan dalam perumusan penanggulangan kemiskinan haruslah merupakan kebalikan, yakni mendahulukan hasrat dan keinginan kaum yang miskin itu sendiri. Pengorganisasian masyarakat miskin, dan mendidik masyarakat miskin untuk menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang ingin mengeksploitasi kemampuan mereka serta mengetahui apa yang mereka inginkan dalam jangka pendek maupun jangka panjang merupakan hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

Campur tangan pemerintah tidak dapat dihindari dalam upaya penanggulangan kemiskinan, berdasarkan hal tersebut terdapat dua cara agar rumusan tujuan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara komprehensif, yaitu: ²⁰

- a. *pertama*, berulang kali menanyakan dan merenungkan apa yang sebenarnya dikehendaki rakyat miskin; dan
- b. *kedua*, kembali lagi ke contoh-contoh dan kasus-kasus nyata yang tidak dapat diterima, serta melakukan analisa terhadap contoh-contoh tersebut daripada mengabstraksikan teori.

Suatu upaya untuk belajar dan mempelajari dari rakyat yang mengalami kemiskinan secara berkelanjutan dan mengembangkan studi dalam mencari apa yang seharusnya dilakukan adalah cara untuk menetapkan dan menjaga arah penanggulangan kemiskinan yang berjalan efektif. Begitu pula Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Sosial yang memiliki tugas untuk melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan demi peningkatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sampang melalui PKH.

²⁰ *Ibid.*

2.2.4.3 Analisa Kegiatan

Analisa tentang apa yang dapat dilakukan, lazimnya mencakup perhitungan tentang biaya dan pilihan, menerangkan penyebab dan kendala-kendala serta menemukan atau menciptakan kesempatan-kesempatan terutama cara-cara bagi rakyat miskin untuk dapat menguasai kondisi kemiskinan yang mereka alami terutama pada saat yang kritis, yaitu ketika nilai dan harga-harga kebutuhan meningkat. Sebagai upaya mengatasi masalah tersebut secara langsung dan efektif, sering diperlukan penggalangan dan pengorganisasian kekuatan kaum miskin, sehingga mampu mengajukan tuntutan atas kekayaan dan pendapatan mereka. Berdasarkan hal tersebut Robert Chambers menjabarkan empat analisa untuk mengetahui solusi menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan meliputi:²¹

a. Pembiayaan dan Pilihan

Pertimbangan biaya merupakan syarat pokok dalam merancang suatu kegiatan. Sumberdaya dalam keadaan langka, dihubungkan dengan kebutuhan dan kesempatan yang ada. Biaya dan manfaat harus benar-benar ditelaah dalam rangka melakukan pilihan-pilihan. Analisa yang cermat dari segi pembiayaan dalam pengambilan keputusan meliputi kapasitas kemampuan pelaksana di lapangan dan kemampuan dukungan administrasi. Menetapkan secara rinci siapa melakukan apa, kapan dan bagaimana dalam mencapai apa yang diperlukan agar terlaksana pembiayaan yang terpadu dan terkoordinasi.

21

b. Penyebab Kendala

Analisa ini memiliki nilai utama pada kemungkinan untuk mengetahui pembiayaan yang paling menguntungkan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor penyebab atau hambatan yang satu dibandingkan dengan lainnya, atau untuk mengungkapkan beberapa faktor yang saling berkaitan yang harus ditanggulangi secara serentak atau secara berturut-turut. Dengan begitu pemerintah dapat menguji kelayakan suatu usulan kegiatan dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab atau kendala yang akan merintang, menghilangkan atau mengalihkan kemaslahatan yang diperlukan oleh masyarakat miskin.

c. Menemukan dan Menciptakan Peluang

Dihadapkan pada situasi konkrit “orang luar” cenderung mencari potensi dari pada masalah, dan peluang daripada hambatan. Tergantung dari sudut mana kita melihatnya, masalah dapat dilihat sebagai peluang atau sebagai kesempatan. Dari kajian tentang peluang dapat timbul rancangan suatu kegiatan. Daftar panjang tentang berbagai kegiatan dapat di susun. Banyak sekali pendekatan yang dapat dilakukan misalnya, dibidang kesehatan, pendidikan, perhubungan, penyediaan air bersih, dan sebagainya.

d. Kelayakan Politis

Suatu analisa tentang kelayakan politis digunakan untuk mendeteksi untung-rugi pelaksanaan proyek dan program bagi masyarakat miskin yang memiliki hubungan dengan elit masyarakat. Analisa ini menyajikan seperangkat pertanyaan dan keterampilan baru dalam menimbang-nimbang untung-rugi serta mengadakan kompromi sebagai bagian dari realisme baru.

2.2.4.4 Kekuasaan dan Golongan Miskin

Dalam melakukan perubahan kondisi masyarakat miskin, Pemerintah atau ‘orang luar’ sebaiknya jangan hanya bekerja dengan orang-orang yang paling miskin atau marjinal, melainkan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan agar terjadi interaksi hubungan pembelajaran dengan pihak lain. Robert Chambers menemukan bahwa kelompok yang memiliki kekuasaan tersebut tidak mampu belajar karena mereka sulit untuk berbeda pendapat dan dikoreksi.

Orang-orang berkuasa ini termasuk golongan profesional, berpendidikan tinggi, kelas menengah ke atas, dsb. Kelompok yang berkuasa ini yang memiliki kesiapan dalam bentuk sumberdaya dalam mengembangkan aksi, namun cenderung menyalahkan kelompok lain sebagai kelompok tidak visioner. Orang luar atau Pemerintah harus melakukan upaya mendorong kelompok yang lebih kuat, untuk melakukan *disempower* sehingga kelompok kuat ini merasakan dan melihat kepentingannya dalam suatu tatanan masyarakat yang terbuka, maju dan harmonis. Jadi, demokratisasi yang merupakan pembagian (*sharing*) kekuasaan di antara kelompok-kelompok berkepentingan, bukan merupakan derma atau belas kasihan pihak kuat kepada yang lemah.

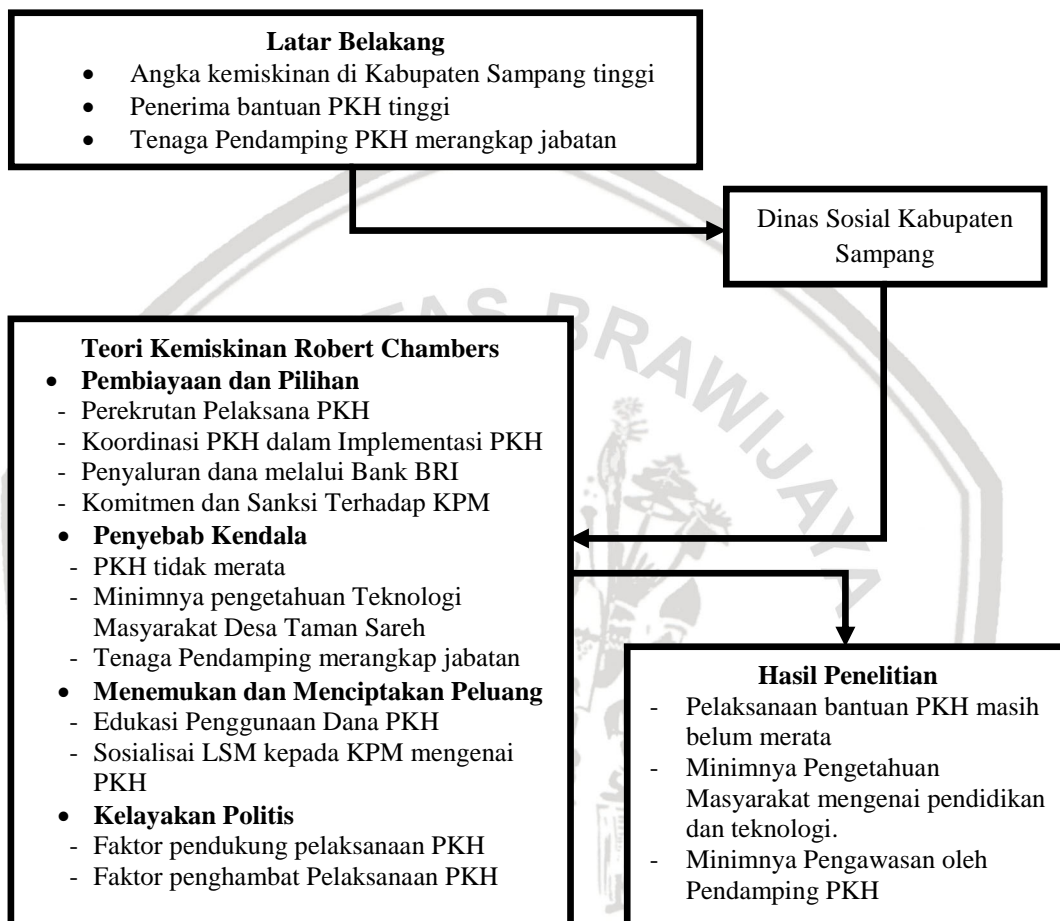
2.3 Alur Fikir Penelitian

Sebagai salah satu upaya dalam memudahkan peneliti untuk mencari data dan menganalisis, memaparkan hasil analisa, maka dibuat alur fikir penelitian sebagai kerangka berfikir dalam penelitian. Berdasarkan pemaparan terkait latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, hingga konsep/teori yang digunakan

dalam melakukan penelitian, peneliti menentukan alur fikir penelitian sebagai berikut:

Bagan 2.2

Alur Fikir Penelitian



Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018.

Pada bagan di atas peneliti akan menjelaskan mengenai alur pikir penelitian. Latar belakang penelitian adalah angka kemiskinan di Kabupaten Sampang cukup tinggi, penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Taman Sareh Kecamatan Sampang adalah paling tertinggi dibandingkan dengan Desa lain, selain itu terdapat tenaga PKH merangkap jabatan yang dimana kinerja akan menyebabkan tidak maksimal. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sampang

melalui Dinas Sosial yang mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial dituntut menyelesaikan permasalahan kemiskinan tersebut.

Peneliti menggunakan teori Robert Chamber sebagai acuan di lapangan. Indikator pembiayaan dan pilihan meliputi perekrutan pelaksana PKH, melalui BINTAP Dinas Sosial Kabupaten Sampang, koordinasi PKH dalam implementasi PKH, penyaluran dana melalui Bank BRI, komitmen dan sanksi terhadap KPM. Kemudian indikator penyebab kendala meliputi: tidak meratanya program keluarga harapan, minimnya pengetahuan teknologi masyarakat Desa Taman Sareh, serta merangkapnya jabatan para tenaga kerja pendamping PKH.

Indikator menemukan dan menciptakan peluang meliputi: edukasi penggunaan dana PKH dan sosialisai LSM kepada KPM mengenai PKH. Indikator yang terakhir adalah kelayakan politis meliputi: faktor pendukung pelaksanaan PKH, dan faktor penghambat Pelaksanaan PKH.

Dari analisis yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teori Robert Chamber adalah kesimpulan yang bisa ditarik dari hasil penelitian di lapangan adalah belum meratanya penyaluran bantuan PKH, selain itu minimnya pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan ATM dikarenakan mayoritas masyarakat Desa Taman Sareh masih GAPTEK, dan kurangnya pengawasan oleh Pendamping PKH mengenai penggunaan dana bantuan dengan sebagaimana semestinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab III, peneliti membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian. Metode penelitian berkaitan dengan jenis penelitian, fokus lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data yang terdiri dari metode wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Selain itu juga pada bab ini akan menjelaskan tentang teknik analisis data.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dipaparkan secara deskriptif analisis. Penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian dengan pendekatan yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah²². Obyek dalam penelitian kualitatif yaitu obyek yang alamiah (*natural setting*), yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek, dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah²³.

Penelitian dengan judul Pengentasan Kemiskinan melalui PKH dengan studi kasus di Desa Taman Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang sebagai instrumen penelitian yang merupakan alat pengumpul data utama. Di sini peneliti ditempatkan sebagai pihak yang berperan aktif dalam setiap kegiatan penelitian. Kemudian, dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan pendekatan

²² Azwar Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001. Hlm 5.

²³ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2010. Hlm 2.

deskriptif. Dimana, laporan penelitian akan berisi sumber-sumber data yang telah diperoleh dengan cara mendeskripsikannya. Data-data tersebut dikaitkan agar setiap sumber data dapat saling memiliki hubungan yang saling menguatkan tema penelitian dan mampu menjawab rumusan penelitian.

Menurut Bogdan dan Taylor, menjelaskan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁴ Data diskriptif dapat dikumpulkan dalam bentuk kata-kata dan gambar yang diperoleh dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya²⁵. Adapun analisis data dalam penelitian kualitatif dilakuakn sejak peneliti menyusun proposal, melaksanakan pengumpulan data dilapangan, sampai peneliti mendapatkan seluruh data²⁶. Hasil penelitian kualitatif sendiri dapat menjadi pedoman atau referensi pada penelitian lain, selama penelitian tersebut masih memiliki karakteristik yang sama.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan, *pertama* di Desa Taman Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, Dinas Sosial lebih umum Pemerintahan Kabupaten Sampang. Hal ini dikarenakan informasi baik berupa data primer dan sekunder ada di kedua lembaga tersebut. *Kedua*, Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH), dimana UPPKH sebagai pelaksana program. *Ketiga*, Bank BRI, sebagai pihak penyalur dana bantuan PKH. *Keempat*, LSM

²⁴ Lexy J. Moloeng. *Metodologi Penelitan Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2003. Hlm 6.

²⁵ *Ibid*, Hlm 11.

²⁶ Sugiyoyo. *Op.Cit.* hal 3. Analisis data yang bersifat induktif disini dapat dimaknai dengan analisis data yang prosesnya yakni mengambil suatu gakta, fenomena, dan peristiwa yang bersifat khusus lalu dijadikan kesimpulan yang lebih bersifat umum.

yang bergerak dalam pelayanan publik yang ada di Kabupaten Sampang. *Kelima*, masyarakat, dimana masyarakat yang menerima program tersebut.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus digunakan sebagai pembatas penelitian agar penelitian terstruktur dan tidak melenceng dari fokus yang sudah ditetapkan. Peneliti mengambil fokus utama dalam menelaah pengentas kemiskinan yang ada di Kabupaten Sampang lebih khusus di Desa Taman Sareh Kecamatan Sampang melalui PKH.

3.4 Jenis Data

Data penelitian yang diperlukan adalah data yang relevan dengan tema dan topik penelitian. Data memiliki makna sebagai keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang dikumpulkan dari suatu populasi atau bagian populasi yang akan digunakan untuk menerangkan ciri populasi yang bersangkutan²⁷. Adapun jenis data yang digunakan terbagi menjadi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan kemiskinan dan Program Keluarga Harapan yang ada di Desa Taman Sareh. Menurut Saifuddin Azwar²⁸ bahwa data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer didapatkan melalui dokumentasi beberapa obyek dan wawancara dengan beberapa pihak yang berkompeten dibidangnya.

²⁷Richard Lungan. *Aplikasi Statistika dan Hitung Peluang*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006. Hal 13.

²⁸*Op.Cit.* Hlm.91.

Data primer penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan beberapa pihak yang terkait antara Pemerintah Desa, Pemkab, UPPKH, LSM, dan KPM PKH.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang diperoleh dari studi kepustakaan atau literatur dan sumber-sumber lain yang tertulis dan berhubungan dengan topik penelitian. Data sekunder berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Apabila data yang diperlukan sesuai tersedia sebagai data sekunder, maka peneliti hanya mengunjungi kepustakaan atau menjelajahi internet, misalnya menentukan sumber yang sesuai, serta mengambil dan mencatat informasi yang diinginkan, misalnya menentukan sumber yang sesuai, serta mengambil dan mencatat informasi yang diinginkan. Data sekunder ini didapatkan seperti arsip di dinas-dinas terkait yang sudah disebutkan di atas.

Menurut Lofland dan Loftland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.²⁹ Sumber data berupa kata-kata dilakukan dengan cara wawancara dengan informan yang memiliki informasi untuk diteliti dan sumber data dari tindakan dilakukan dengan cara observasi dari kegiatan yang dilakukan dilapangan. Sedangkan, sumber data dari data sekunder yaitu sumber data tertulis, foto, data statistik, dan lain-lain.

²⁹ *Ibid.* hlm 157.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dengan melihat jenis dan sumber data tersebut di atas, teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut.

3.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti. Wawancara akan dilakukan kepada orang-orang yang terkait dengan persoalan PKH, baik pemerintah, ataupun masyarakat yang menerima PKH. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu.³⁰ Definisi lain menjelaskan bahwa wawancara adalah metode pengumpulan data yang amat populer, karena itu banyak digunakan di berbagai penelitian³¹. Sebagaimana ditegaskan oleh Susan dalam Sugiyono³² yang mengatakan bahwa:

Interviewing provide the researcher a means to gain a deeper understanding of how the participant interpret a situation of phenomenon can be gained through observation alone. (dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.)

Wawancara menjadi salah satu sumber data dalam penelitian ini yang dilakukan kepada beberapa individu yang dirasa mampu menjadi informan dalam memberikan informasi. Di sisi lain, informan yang peneliti pilih yakni masyarakat, dimana masyarakat adalah yang paling merasakan PKH. Wawancara memiliki dua jenis yakni dapat digunakan peneliti dalam mengumpulkan data

³⁰ *Ibid.*, hlm 186.

³¹ Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006. hlm 126

³² Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2010. Hlm 72

ilmiah, yaitu wawancara tak berstruktur dan wawancara terstruktur³³. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara yang terstruktur, dimana peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa saja yang akan didapatkan. Adapun pengertian wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan³⁴. Wawancara terstruktur peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk mengumpulkan data dan menggunakan alat bantu, misalnya *tape recorder*, gambar, brosur, dan segala hal yang mendukung kelancaran wawancara³⁵. Dilain sisi, peneliti dalam menggunakan wawancara terbuka karena sesuai dengan pandangan kualitatif yaitu terbuka. Wawancara terbuka dilakukan dimana para subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan wawancara tersebut.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti seperti dijelaskan diparagraf di atas yakni wawancara terbuka dan terstruktur. Kemudian selain metode yang telah dijelaskan, untuk menetapkan narasumber dalam wawancara nantinya peneliti menggunakan teknik penentuan narasumber bertujuan yang biasa disebut *purposive*. Teknik penentuan narasumber wawancara ini digunakan untuk menentukan informan yang dipilih berdasarkan tujuan penelitian atau bisa dikatakan juga penunjukkan narasumber secara khusus yang dirasa dapat memberikan informasi terkait penelitian. Wawancara dimulai oleh peneliti dengan menentukan informan yang akan diwawancara dan dianggap penting dan utama. Selain informan utama, peneliti juga memerlukan informan tambahan sebagai

³³ James A. Black dan Dean J. Champion. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama. 2009. Hlm 306

³⁴ Lexy J. Moelong. *Op.cit.* hlm. 314.

³⁵ Sugiyono. *Op.Cit.* hlm. 73.

informan lain yang memiliki cara pandang berbeda. Informan yang dirasa sesuai dan berkompeten dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun narasumber yang ditetapkan pada penelitian ini antara lain bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Daftar Informan

No	Nama Informan	Jabatan
1	Syamsul Hidayat	Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dan Bantuan Sosial Dinsos Kabupaten Sampang
2	Musemmil	Kepala Desa Taman Sareh
3	Nanang	Koordinator PKH
4	Ahmad Fauzi	Tenaga Pendamping PKH Desa Taman Sareh
5	Hakim Muhammed	Lembaga Swadaya Masyarakat (Jaringan Kawal Jawa Timur)
6	Agus Buono	Pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI)
7	<ul style="list-style-type: none"> - Sumriyah - Nafiah - Mariah - Najmah - Khotijah - Dakir - Bintiah - Rumiyah - Hatipah - Sumiyem 	Masyarakat Desa Taman Sareh

Sumber: Olahan Peneliti: 2018.

Dasar penentuan informan adalah seperti yang dijelaskan di paragraf sebelumnya bahwa narasumber secara khusus dapat memberikan informasi terkait penelitian dan narasumber tersebut dianggap penting dan utama.

3.5.2 Studi Pustaka

Studi pustaka berfungsi sebagai dasar ilmiah terhadap permasalahan yang dicoba. Dasar ilmiah tersebut penting dan harus dipahami sebelum pelaksanaan percobaan berlangsung, karena apa yang peneliti lakukan adalah penelitian ilmiah, bukan sekedar mencoba (*trial and error*)³⁶. Studi pustaka dapat dipelajari dengan mempelajari dan memahami isi letaratur (buku), jurnal, dokumen, baik dokumen resmi maupun dokumen pribadi. Studi pustaka sangat berguna dalam penelitian karena sesuai dengan penelitian dan bersifat ilmiah serta sesuai dengan konteks³⁷.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dilakukan yaitu dengan cara deskriptif kualitatif yang berpatokan pada pandangan Bogdan dan Biklen³⁸, yang selanjutnya data temuan lapangan yakni di Desa Taman Sareh dan narasumber yang terlibat terkumpul diorganisasikan, diseleksi, disintesis untuk mencari apa yang penting dan yang dipelajari, kemudian, dideskripsikan secara menyeluruh dan dianalisis. Sehingga, analisis data akan menghasilkan sebuah kesimpulan umum yang mampu menjawab permasalahan penelitian seperti misal apakah program PKH benar-benar mengentas kemiskinan yang ada di desa tersebut dan sudah efektif atau malah menimbulkan persoalan lain. Langkah selanjutnya adalah memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan

³⁶ Yogi Sugito. *Metodologi Penelitian*. Malang: Ub Press. 2009. Hlm 22

³⁷ Lexy J. Moleong, *op.cit.* hlm. 217

³⁸ *Ibid.* hlm. 248.

analisis sesuai kemampuan daya peneliti untuk pembuat kesimpulan penelitian³⁹. Di akhir penelitian, penulis menarik kesimpulan, dimana pada tahap kesimpulan yakni memunculkan permasalahan, dan permasalahan tersebut dimunculkan di rekomendasi.

Ada beberapa cara dalam melakukan analisis data. Peneliti menggunakan model penulisan kualitatif versi Miles dan Huberman. Selain itu, model Miles dan Huberman menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh⁴⁰. Ada tiga unsur menurut Miles dan Huberman dalam Husaini Usman diantaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi⁴¹.

Pertama, reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan⁴². Selain itu, dengan reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, seperti misalnya pada penelitian kualitatif tujuan utama reduksi data adalah sebuah temuan. *Kedua*, penyajian data adalah pendiskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan⁴³. Penyajian data memberikan kemudahan bagi peneliti untuk membuat kesimpulan dengan menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang mudah

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Sugiyono. *Op.cit.* hlm. 91.

⁴¹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2009. Hlm.84.

⁴² *Ibid.* hlm.85.

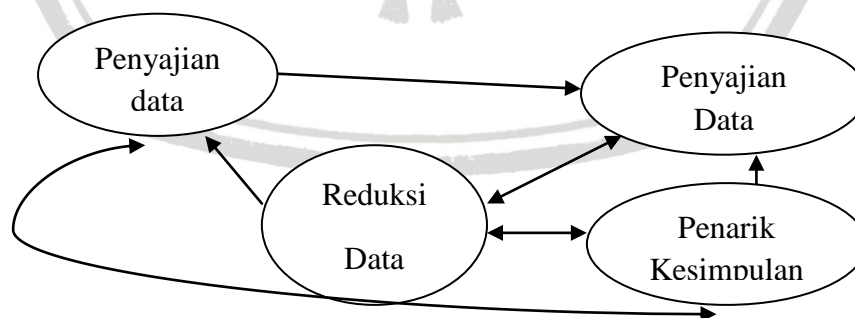
⁴³ *Ibid.* hlm.87.

dipahami., misalnya dalam bentuk grafik, matrik, *network* dan *chart* maupun bagan. Untuk memudahkan peneliti yakni dengan memilah data-data primer dan sekunder yang kemudian oleh peneliti diolah menggunakan indikator konsep dan teori, yang selanjutnya data tersebut dibungkan melalui bagan grafik ataupun lainnya yang mudah dipahami.

Ketiga atau tahap terakhir menurut Miles dan Huberman yakni penarik kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap ini penulis harus mampu menguraikan dari tahap pertama sampai pada tahap penarik kesimpulan dengan bukti-bukti atau data yang valid, sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kredibel. Dalam tahap ini merupakan tahap yang penting, dimana tahap kesimpulan yakni memunculkan persoalan baik dari sisi kekurangan atau pun kelebihan sesuai indikator yang digunakan oleh peneliti terkait penelitian tentang pengentas kemiskinan melalui PKH di Desa Taman Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

Bagan 3.1

Model Interaktif Miles dan Huberman



Sumber: Diolah dari buku Metode Penelitian Sosial karya Husain Usman dan Purnomo Setiady (2009)

BAB IV

GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini akan membahas bagaimana Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sampang, dan aktor-aktor pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH). Bab ini berfungsi agar pembaca mengetahui gambaran umum yang ada di Kabupaten Sampang dan aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan PKH.

4.1 Kondisi Sosial Desa Taman Sareh

Dalam sub bab ini peneliti akan menjelaskan tentang kondisi keadaan sosial Di Desa Taman Sareh. Mulai dari jumlah penduduk dan kesejahteraan sosial masyarakat, Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Musemmil selaku Kepala Desa Taman Sareh:⁴⁴

“Di desa taman Sareh Kabupaten Sampang terdapat 9 dusun dimana 9 dusun tersebut dihuni oleh sekitar 5.610 penduduk. Dari 5.610 penduduk tersebut terdapat 1.193 rumah tangga.”

Desa Taman Sareh terletak di kecamatan Sampang kabupaten Sampang yang terdapat 9 Dusun di Desa tersebut. Desa Taman Sareh memiliki 5.610 penduduk. Dari total angka jumlah penduduk tersebut terdapat 1193 rumah tangga.

Desa Taman Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang tersebut merupakan desa tertinggal dalam penilaian Indeks Desa Membangun (IDM). Dalam Permendesa dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun yakni: Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Musemmil selaku Kepala Desa Taman Sareh, pada tanggal 25 Juli 2018, Pukul: 09.40 WIB

Mandiri. Secara umum Pedoman Indeks Desa Membangun (IDM) disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah, dan Desa dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa.⁸⁷

Salah satu yang mempengaruhi suatu daerah disebut miskin yakni dilihat dari Indeks Desa Membangun atau status desa yang disandangnya, maksudnya bahwa IDM mengklasifikasikan Desa dalam lima (5) status, yakni Desa Sangat Tertinggal ($\leq 0,491$), Desa Tertinggal ($> 0,491$ dan $\leq 0,599$), Desa Berkembang ($> 0,599$ dan $\leq 0,707$), Desa Maju ($> 0,707$ dan $\leq 0,815$), Desa Mandiri ($> 0,815$)⁸⁸.

Klasifikasi dalam 5 status Desa tersebut untuk menajamkan status perkembangan desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Dalam hal ini, Desa Taman Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang berpredikat Desa Tertinggal dengan penailain 0,5881, Ini artinya perlu ada penanganan yang ekstra, semisal pembentukan atau mengeluarkan kebijakan yang mengentas kemiskinan, salah satunya program kebijakan PKH dari pusat. Akan tetapi setiap program kebijakan tidak semuanya berjalan seperti yang direncanakan, seperti halnya di Desa Taman Sareh, sampai saat ini masih mendapatkan predikat sebagai Desa Tertinggal.

Selain itu salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah pendidikan, latar belakang pendidikan di Desa Taman Sareh adalah mayoritas Lulusan SD. Rata-

⁸⁷ Permendesa dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun

⁸⁸ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. *Indeks Desa Membangun Tahun 2015*. Hlm 5

rata penduduk Desa Taman Sareh berprofesi sebagai petani. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Musemmil selaku Kepala Desa Taman Sareh:⁸⁹

“Desa Taman Sareh termasuk Desa Tertinggal, disini mayoritas tingkat pendidikan masyarakat Desa Taman Sareh adalah hanya lulusan Sekolah Dasar dan rata-rata pekerjaannya adalah sebagai petani. Petani disini mempunyai penghasilan yang tidak cukup banyak bahkan dikatakan sedikit karena hanya menghasilkan sekitar Rp. 500.000,00 sampai dengan Rp. 800.000,00. perbulan ”

Desa Taman Sareh yang termasuk Desa Tertinggal memiliki penduduk dengan mayoritas berprofesi sebagai petani. Latar belakang pendidikan masyarakat Desa Taman Sareh adalah lulusan Sekolah Dasar. Profesi petani di Kabupaten Sampang Desa Taman Sareh menghasilkan Rp. 500.000,00 sampai dengan Rp. 800.000,00 perbulan. Tentunya penghasilan tersebut kurang dari cukup apabila di bandingkan dengan kebutuhan pokok sehari-hari yang di konsumsi.

4.2 Aktor-Aktor Pelaksanaan Kebijakan

Dalam pelaksanaan program PKH Di Kabupaten Sampang Khususnya di Desa Taman Sareh tentunya terdapat aktor-aktor yang berperan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tersebut, diantaranya pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PKH, Drs. Syamsul Hidayat selaku Kabid Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Sampang menuturkan bahwa:⁹⁰

“Yang terlibat dalam PKH ini yaitu: “Kementerian Sosial, kemudian Provinsi, pemerintah daerah/kabupaten, Dinas Sosial, Koordinator PKH, baru ke pendamping PKH, pendamping disini sangat berperan penting karena pendamping adalah sebagai jembatan masyarakat dalam

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Musemmil selaku Kepala Desa Taman Sareh. Tanggal 18 November 2018: pukul 10.15.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Drs. Syamsul Hidayat, selaku Kabid Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sampang, di Kantor Dinas sosial, pada tanggal 6 Juli 2018, Pukul: 10.22 WIB

memperoleh bantuan tersebut, di Kabupaten Sampang adanya koordinator pendamping untuk mengawasi kinerja semua pendamping,”

Aktor atau pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan PKH diantaranya adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang, Dinas Sosial Kabupaten Sampang, Koordinator PKH, dan Pendamping PKH. Berikut adalah alur aktor Pelaksana PKH sebagai berikut:

Bagan 4.1
Alur Aktor PKH



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sampang 2018

Dalam bagan diatas dapat dijelaskan mengenai alur aktor yang terlibat dalam pelaksanaan PKH. Dari urutan paling atas yakni Menteri Sosial Republik Indonesia sebagai pembuat kebijakan yang mengurus persoalan masalah sosial yang ada di seluruh daerah Indonesia. Kebijakan tersebut yang sudah tertulis Di Permensos akan diteruskan kepada wilayah pemerintahan yang berada satu tingkatnya yakni Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian pemerintah

Provinsi Jawa Timur akan melanjutkan kebijakan tersebut ke Pemerintah Kabupaten Sampang yang dimana selanjutnya akan Ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Sampang, tidak sampai di situ Dinas Sosial membentuk Koordinator PKH, dan sebagai pelaksana kebijakan, pendamping dilapangan atau yang disebut dengan Pendamping PKH.

4.2.1 Menteri Sosial Republik Indonesia

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, dinyatakan bahwa Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. dan inklusivitas. Menteri sosial menjadi salah satu aktor perumus kebijakan di bidang sosial. Kebijakan PKH sendiri di atur dalam PERMENSOS no 10 Tahun 2017 tentang PKH. Dengan indikator sasaran PKH adalah sebagai berikut.⁹¹

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang diusulkan oleh pemerintah daerah bersama dengan tokoh masyarakat yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Wilayah PKH Akses sebagaimana terdiri atas: daerah tertinggal, daerah terpencil, dan pulau terluar. Kriteria komponen kesehatan meliputi: ibu hamil/menyusui, anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. Kemudian untuk komponen pendidikan yakni: anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTs atau sederajat, anak SMA/MA atau sederajat, dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

⁹¹ PERMENSOS no 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan.

Sedangkan untuk komponen kesejahteraan sosial meliputi: lanjut usia diutamakan mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

4.2.2 Dinas Sosial Kabupaten Sampang

Dinas Sosial Kabupaten Sampang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dinas Sosial mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang sosial. Dinas Sosial bertugas sebagai pelaksana dalam kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sampang, salah satu pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial adalah kebijakan yang menyangkut permasalahan sosial, atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Untuk melakukan penanganan terhadap PMKS perlu dilakukan dengan upaya koordinasi secara terpadu dengan mengikut sertakan seluruh komponen, baik dari pihak pemerintah maupun non pemerintah, juga peran serta masyarakat luas dalam pelaksanaan pemberdayaan. Dinas sosial sendiri mempunyai tugas dan fungsi yang cukup spesifik yakni mengurus masalah sosial yang ada di Kabupaten Sampang. Kewenangannya berupa meningkatkan kesejahteraan sosial. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang sejahtera. Dengan adanya Dinas Sosial diharap dapat menciptakan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup seseorang pun akan lebih baik jika kondisi permasalahan kesejahteraan sosial dapat teratasi.

A. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- d. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

B. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan kegiatan pemberdayaan Sosial;
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran Bidang Pemberdayaan Sosial;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Sosial;
- d. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas

C. Bidang Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial

Bidang Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kegiatan Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial;
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran Bidang Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial;
- d. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4.2.3 Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH)

Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Sampang meliputi koordinator PKH dan Pendamping PKH. Koordinator dan pendamping PKH sebagai pelaksana program yang telah di implementasikan oleh pemerintah. UPPKH sendiri terdiri dari tenaga kerja non PNS atau karyawan kontrak yang digaji oleh pemerintah.

4.2.3.1 Koordinator PKH

Koordinator PKH disini adalah sebagai leader dalam mengatur anak buahnya yakni pendamping PKH. Koordinator PKH sendiri dibentuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Sampang melalui Bimbingan dan Pemantapan. SDM yang dirasa mampu melaksanakan tugasnya di lapangan, Koordinator PKH sendiri mempunyai tugas sebagai Koordinator dalam melaksanakan PKH terhadap Pendamping PKH. Serta memberikan tugas kepada Pendamping PKH menurut TUPOKSI yang sudah diatur. Koordinator PKH ini dibentuk oleh Dinas Sosial sebagai tenaga Kerja non PNS dimana mereka mendapatkan upah dari Pemerintah.

4.2.3.2 Pendamping PKH

Pendamping PKH adalah orang yang akan berurusan langsung dengan KPM di lapangan. Pendamping PKH sebagai pelaksana akan melaksanakan

tugasnya yakni diantaranya adalah melakukan pendataan, verifikasi data, survey, dan edukasi terhadap KPM. Pendamping PKH dibentuk oleh Dinas Sosial melalui Bimbingan Pemantapan. Pendamping PKH di bawah Koordinator PKH dimana mereka adalah tenaga kerja non-PNS yang diberi upah oleh Pemerintah.



BAB V

PEMBAHASAN

Analisis Progam Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Taman Sareh Kabupaten Sampang

Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.⁹² Tujuan dari program keluarga harapan tersebut adalah untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu PKH juga mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan serta menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.⁹³

Program Keluarga Harapan sudah mulai dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2007 dan bukan merupakan program lanjutan dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT). PKH dilaksanakan sebagai upaya dalam membangun sistem perlindungan social kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus memotong rantai kemiskinan.⁹⁴

⁹² Peraturan MenteriI Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ Wawancara dengan Syamsul Hidayat *op. cit.*

PKH masuk dalam program bantuan dan perlindungan sosial sebagai strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. PKH merupakan program bantuan tunai bersyarat karena setiap calon peserta yang akan menerima bantuan harus memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditentukan dan selama menerima bantuan harus melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai peserta PKH. Kesenambungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat pencapaian tujuan dan manfaat jangka pendek dari PKH yaitu PKH akan memberikan *income effect* kepada KSM/RTSM melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga.

Sedangkan manfaat jangka panjangnya yaitu PKH diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak di masa depan serta memberikan kepastian kepada anak akan masa depannya.


5.1 Pelaksanaan PKH di Desa Taman Sareh Kabupaten Sampang

Pemerintah Kabupaten Sampang mengimplementasikan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan program PKH tersebut, di Desa Taman Sareh terdapat empat pendamping PKH yang terdiri dari Ahmad Fauzi, Eko Budi Hartono, Mudiatun Holidah dan Shohiful Islam. Dari empat pendamping PKH tersebut penulis hanya bisa bertemu dan wawancara dengan bapak Ahmad Fauzi. tiga

pendamping yang lain penulis tidak dapat bertemu di karenakan tiga pendamping tersebut sedang berada di Desa Lain. Jadi, penulis turun ke desa dan mencari data hanya dengan bapak Ahmad Fauzi.

Dinas Sosial Kabupaten Sampang mengimplementasikan PKH terhadap masyarakat miskin, dengan tepat sasaran. Masyarakat yang mendapatkan bantuan program tersebut adalah benar-benar masyarakat miskin. Data penyanggah masalah kesejahteraan sosial kemiskinan tersebut didapat dari Tim Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Syamsul Hidayat selaku Kabid Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial:⁹⁵



“Masyarakat kelompok paling bawah adalah sasaran dari program tersebut, kriteria tersebut sudah ditentukan oleh pemerintah melalui Tim Penanggulangan Kemiskinan. Penilaian tersebut dari segi kondisi ekonomi dan keadaan masyarakat tersebut. Apabila terjadi salah sasaran Dinas Sosial beserta Lembaga yang terlibat akan melakukan verifikasi. Tujuan verifikasi adalah untuk memastikan bahwa penerima bantuan PKH adalah benar-benar orang miskin dan layak untuk mendapatkan bantuan”

Penentuan penerima bantuan PKH dilihat dari segi ekonomi masyarakat dan keadaan masyarakat tersebut. TNP2K melakukan pendataan Apabila terjadi salah sasaran dalam pemberian bantuan PKH Dinas Sosial Kabupaten Sampang beserta Lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan PKH akan melakukan verifikasi, tujuan verifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa penerima bantuan PKH tersebut adalah benar-benar orang miskin dan layak untuk mendapatkan bantuan PKH.

Peneliti akan membahas mengenai pelaksanaan PKH di Desa Taman Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Di Desa Taman Sareh sendiri mayoritas adalah masyarakat kelompok bawah atau termasuk dalam kelompok

⁹⁵ *Ibid*

Desa tertinggal. Pemerintah melalui Dinas Sosial yang berwenang mengatasi permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Sampang, Desa Taman Sareh tersebut nantinya akan dijelaskan lebih detail oleh peneliti dengan menggunakan teori yang sudah dipilih dan dirasa peneliti sudah tepat.

5.1.1 Pembiayaan dan Pilihan

Analisa yang cermat dari segi pembiayaan dalam pengambilan keputusan meliputi kapasitas kemampuan pelaksana di lapangan dan kemampuan dukungan administrasi. Menetapkan secara rinci siapa melakukan apa, kapan dan bagaimana dalam mencapai apa yang diperlukan agar terlaksana pembiayaan yang terpadu dan terkoordinasi.

5.1.1.1 Perekrutan Pelaksana PKH

Dalam segi pembiayaan dan pengambilan keputusan ini pelaksana atau tenaga kerja PKH harus memiliki kemampuan dalam mengkoordinasi masyarakat miskin. Hal tersebut sangat penting karena menyangkut dalam pelaksanaan program sebagai pelaksana PKH. Pelaksanaan kebijakan harus memperhatikan kinerja daripada SDM nya, untuk mencapai tujuan dari implementasi kebijakan tersebut. Untuk itu kemampuan dalam melaksanakan kebijakan harus diperhatikan. Dalam perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM) yakni pelaksana PKH yaitu melalui Seleksi Online. Berikut alur Perekrutan PKH :

Bagan 5.1
Alur Perekrutan Pelaksana PKH



Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2018

Pada bagan di atas peneliti akan menjelaskan mengenai alur perekrutan PKH. Calon SDM pelaksana PKH melakukan pendaftaran online melalui aplikasi berbasis android yang dapat diunduh di *Google Playstore* lalu mengisi form pendaftaran yang sudah ada di aplikasi tersebut. selanjutnya calon pelaksana PKH tersebut akan diseleksi dengan dua tahapan seleksi yaitu; Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi Bidang. Seleksi Administrasi adalah seleksi yang dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dokumen pelamar yang telah diisi di form pendaftaran, Seleksi Kompetensi Bidang adalah menggunakan metode tes tulis di tempat dan waktu yang telah diinformasikan. Pengumuman hasil seleksi akan diinformasikan melalui email dan notifikasi kepada masing-masing calon pelaksana PKH yang dinyatakan lulus. Calon pelaksana PKH yang telah lulus akan diberikan Bimbingan dan Pemantapan oleh Dinas Sosial. Bimbingan dan Pemantapan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Seperti yang diungkapkan Drs.

Syamsul Hidayat selaku Kabid Perlindungan Sosial Dinsos Kabupaten Sampang:⁹⁶

“Pelaksana PKH yang sudah lulus seleksi harus mempunyai kemampuan di lapangan sehingga semua bisa terkoordinasi. Untuk itu mereka harus mengikuti Bimbingan Pemantapan (Bintap). Bimbingan dan Pemantapan tersebut sangat penting untuk modal para pelaksana PKH sehingga melaksanakan tugasnya dengan baik nantinya.”

Pelaksana PKH sebelum melaksanakan tugasnya di lapangan harus mempunyai kemampuan dalam pelaksanaan program tersebut. Dimana tugasnya adalah mengkoordinasi penerima bantuan tersebut yakni masyarakat miskin. Untuk itu sangat penting dalam pemberian Bimbingan dan Pemantapan bagi pelaksana PKH sebelum melaksanakan tugasnya di lapangan. Dalam segi pembiayaan Dinas Sosial dalam melaksanakan bimbingan dan pemantapan serta perekrutan Pendamping PKH tersebut. Pengambilan keputusan tersebut dirasa sudah tepat dan tidak mengeluarkan dana yang cukup banyak. Pelaksana PKH adalah tenaga kerja non PNS yang dipekerjakan oleh pemerintah dengan digaji sebagai non-PNS sebesar Rp. 2.600.000.

5.1.1.2 Koordinasi PKH Dalam Pelaksanaan PKH di Desa Taman Sareh

Didalam pelaksanaan program PKH dengan adanya pendamping PKH dalam pelaksanaanya, selain itu juga terdapat koordinator PKH. Koordinator PKH ini dibentuk oleh Dinas Sosial melalui Bintap, yang di mana terlibat langsung dalam pelaksanaan Program PKH. Koordinator PKH sebagai pelaksana

⁹⁶ *Ibid*

mempunyai tugas sesuai dengan Tupoksi sebagai pelaksana. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Nanang selaku Koordinator PKH Kabupaten Sampang:⁹⁷

“Sebagai pelaksana kita melakukan tugas sesuai dengan Tupoksi diantaranya seperti pendataan awal, verifikasi Pendidikan, kesehatan, dan penyaluran. Data yang kita peroleh dari pusat yakni dari tim penanggulangan kemiskinan, setelah itu kita melakukan validasi.”

Sebagai pelaksana kebijakan Koordinator PKH melakukan tugas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi mereka sebagai pelaksana. Tugas tersebut diantaranya adalah melakukan pendataan awal, melakukan verifikasi Pendidikan ke sekolah-sekolah melakukan absensi, verifikasi kondisi kesehatan KPM di fasilitas kesehatan, dan penyaluran dana bantuan. Data masyarakat miskin di Taman Sareh yakni diperoleh dari Tim Penanggulangan Kemiskinan. Koordinator PKH serta pendamping PKH sebagai pelaksana, melaksanakan tugasnya yakni melakukan survey *door to door* sesuai data yang diberikan oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan. Seperti yang di ungkapkan oleh Ahmad Fauzi selaku pendamping PKH:⁹⁸

“Pendamping PKH akan melakukan survey door to door mengenai pendidikan calon penerima bantuan, kesehatan masyarakat miskin di Desa Taman Sareh, serta kondisi rumah. Tujuan tersebut adalah untuk memastikan bahwa data yang sudah terdaftar adalah benar, sehingga tidak salah sasaran.”

Pendamping PKH melakukan survey untuk masyarakat penerima bantuan PKH dengan cara *door to door*. Survey tersebut meliputi Pendidikan calon penerima bantuan PKH, kondisi dari rumah masyarakat tersebut, dan kondisi

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Nanang, selaku Koordinator PKH Kabupaten Sampang, di Kantor Dinas sosial, pada tanggal 26 Juni 2018, Pukul: 13.33 WIB

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi selaku pendamping PKH Desa Taman Sareh, di Desa Taman Sareh pada tanggal 29 Juni 2018, pukul: 14.27 WIB

kesehatan. Tujuan dari dilakukanya survey tersebut adalah untuk meminimalisir adanya salah sasaran pemberian bantuan PKH yang dilaksanakan.

5.1.1.3 Penyaluran Dana Bantuan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Didalam tahap pelaksanaan program keluarga harapan dengan dana bantuan yang disalurkan melalui Bank, hal tersebut dikarenakan sudah ditentukan dan diambil keputusan oleh pemerintah atas pertimbangan-pertimbangan yang sudah ditetapkan. Untuk penyaluran dana dari pemerintah yakni Kementerian Sosial akan melibatkan Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni Bank BRI khusus di Kabupaten Sampang. Dana tersebut akan disalurkan secara non tunai melalui Bank kemudian akan diberikan langsung oleh Penerima Bantuan tersebut sesuai dengan data diri *by name by address* melalui rekening penerima bantuan PKH. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Agus Buono selaku pihak dari Bank BRI:⁹⁹

“Bank BRI sebagai pembayar bukan penyalur bantuan PKH, penyalurnya adalah Dinsos. Pihak Bank BRI akan membayar bantuan tersebut kepada penerima bantuan PKH setelah melakukan pengecekan data by name by address kemudian dana bantuan tersebut dibayarkan kepada KPM sejumlah Rp. 500.000,00 dari tahap satu sampai tahap tiga dan tahap keempat mendapatkan sebesar Rp.390.000 jadi total yang diterima KPM sebesar Rp. 1.890.000 selama setahun”

Bank BRI bukan sebagai penyalur dana PKH melainkan sebagai pembayar bantuan Pemerintah PKH tersebut kepada penerima bantuan. Setelah melakukan pendataan *by name by address*, penerima bantuan PKH masyarakat Desa Taman Sareh akan dijadwalkan dalam pembagian dana tersebut dengan mencetak buku rekening dan kartu ATM bagi penerima bantuan. Untuk jumlah dana yang dibayarkan kepada KPM adalah secara bertahap yakni Rp. 500.000,00 dari tahap

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Buono selaku Pihak dari Bank BRI pada tanggal 23 Juli 2018, pukul: 17.02 WIB

satu sampai tahap tiga dan tahap keempat mendapatkan sebesar Rp.390.000 jadi total yang diterima KPM sebesar Rp. 1.890.000 selama setahun.

5.1.1.4 Komitmen dan Sanksi Terhadap KPM PKH

Dalam pelaksanaan PKH juga terdapat mengenai keputusan sanksi dan komitmen. Sanksi adalah sebuah *punishment* terhadap KPM yang melanggar mengenai peraturan penerima bantuan PKH. Saksi tersebut berlaku kepada KPM. Sanksi akan diberikan kepada KPM yang melakukan kecurangan. Seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Fauzi selaku pendamping PKH:¹⁰⁰

“Sanksi tersebut sebagai teguran kepada KPM yang melakukan penyalahgunaan dana bantuan PKH tersebut dengan tidak semestinya, sanksi berupa pemberhentian sementara bantuan sampai pencabutan pemberian bantuan. Apabila mereka satu kali, dua kali masih di pending bantuanya, kalo terus menerus kita temui melakukan penyalahgunaan maka akan di stop bantuanya”

Sanksi adalah sebuah teguran kepada KPM atau *punishment* terhadap KPM PKH yang menyalahi aturan. Hal tersebut bias dicontohkan dengan KPM yang melakukan penyalahgunaan dana bantuan PKH tersebut dengan tidak sebagaimana mestinya. Sanksi tersebut berupa pemberhentian sementara dana bantuan tersebut. Apabila dilapangan ditemukan KPM PKH yang berkali-kali melanggar peraturan maka dana bantuan tersebut akan di berhentikan. Selain itu juga komitmen yang diperlukan dalam kedua belah pihak. Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Sumriyah selaku penerima bantuan PKH:¹⁰¹

“Kita harus mematuhi peraturan yang diberikan oleh pemerintah, karena kita bersyukur bantuan tersebut bermanfaat dan sangat membantu kondisi

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi *op. cit*

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Sumriyah selaku KPM PKH, pada tanggal 29 Juni 2018, pukul: 14.27 WIB

ekonomi kita. Kalo tidak mematuhi peraturan tersebut nanti bantuan dana PKH tersebut akan dicabut.”

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu KPM di Desa Taman Sareh tersebut bahwa mereka selalu berkomitmen mengenai peraturan penerima bantuan dana tersebut. Mereka sangat terbantu dengan adanya bantuan PKH khususnya dari segi ekonomi. Untuk itu sebagai timbal balik KPM harus berkomitmen dalam mematuhi peraturan penerima bantuan PKH.

5.1.2 Penyebab Kendala

Dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya Program Keluarga Harapan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin di Desa Taman Sareh masih terdapat permasalahan yang masih berakar, tentunya terdapat masyarakat miskin penerima Bantuan PKH tersebut yang masih malas untuk belajar, dimana usia pelajar harus melaksanakan kewajibanya untuk belajar.

5.1.2.1 Pola Pikir Masyarakat

Masalah yang masih berakar adalah pola pikir masyarakat miskin tersebut. Di mana mereka berfikir apabila menjadi orang dalam golongan tingkat bawah lebih memikirkan untuk bagaimana cara mencari uang, sekalipun mereka adalah masih usia pelajar. Seperti yang diungkapkan oleh Nanang selaku koordinator PKH: ¹⁰²

“Masyarakat miskin yang masih di usia pelajar harus melakukan kewajibanya sebagai pelajar, mayoritas kelompok masyarakat miskin lebih berfikir untuk mencari uang daripada belajar karena mereka merasa tidak mampu. Selain itu juga cara orang tua dalam mendidik anak dirasa kurang benar dimana anak usia pelajar tidak seharusnya untuk mencari uang, melainkan mereka harus melakukan kewajibanya untuk belajar.”

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Nanang *op. cit*

Mayoritas masyarakat Desa Taman Sareh yang bisa dibilang Desa tertinggal lebih berfikir mencari uang daripada menuntut ilmu. Hal tersebut dikarenakan kondisi ekonomi yang mereka hadapi karena mereka merasa tidak mampu. Hal tersebut juga dikarenakan mental atau pola pikir dari masyarakat miskin tersebut. Di samping itu cara orang tua mendidik anak yang dirasa perlu diperhatikan, dimana orang tua tidak seharusnya mengharuskan anak-anak di usia pelajar untuk mencari uang. Mental atau pola pikir tersebut yang menjadikan masyarakat miskin bisa tidak mudah dalam menemukan solusinya. Selain itu seperti yang dituturkan oleh Hakim Muhammed selaku LSM Jaringan Kawal Jawa Timur (Jakajatim):¹⁰³

“Minimnya pendidikan serta mental adalah salah satu faktor penyebab masyarakat Desa Taman Sareh ini mengalami kemiskinan. Butuhnya penanganan yang lebih dari pemerintah untuk menangani permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di Desa Taman Sareh Kabupaten Sampang agar segera terselesaikan. Sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat, kita hanya sebagai Penyambung Lidah Masyarakat (Pelir) tentunya kita tidak terlibat langsung dalam PKH. Dalam pelaksanaan PKH selama ini berjalan cukup sesuai dengan apa yang diharapkan.”

Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdapat di Kabupten Sampang tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan PKH. LSM hanya sebagai penyambung lidah masyarakat atau sebagai penampung keluhan masyarakat Desa Taman Sareh dimana akan disampaikan terhadap pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Sampang. Permasalahan yang masih berakar adalah mengenai minimnya Pendidikan serta mental dari masyarakat Desa Taman Sareh yang perlu dirubah. Merubah pola pikir itu adalah sangat penting karena akan membantu masyarakat itu sendiri untuk merubah kehidupannya. Untuk itu pemerintah Kabupaten

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Hakim Muhammed selaku LSM Jaringan Kawal Jawa Timut (Jakajatim), pada tanggal 23 Juli 2018, pukul : 20.57 WIB

Sampang melalui Dinas Sosial di tuntut menyelesaikan permasalahan kesejahteraan sosial tersebut. PKH sendiri di Desa Taman Sareh sudah cukup terlaksanakan sesuai dengan Harapan.

5.1.2.2 Minimnya Pengetahuan Teknologi

Selain pola pikir masyarakat yang perlu dirubah juga terdapat kendala masyarakat miskin di Desa Taman Sareh lainnya. Kendala tersebut yakni adalah masalah Pendidikan yang hanya lulusan Sekolah Dasar. Seperti yang di ungkapkan oleh Drs. Syamsul Hidayat selaku Kabid Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sampang:¹⁰⁴

“Masyarakat RTSM di Desa Taman Sareh kebanyakan minimnya pengetahuan mengenai teknologi menjadikan suatu kendala tersendiri, hal tersebut contohnya KPM yang tidak mengerti mengenai penggunaan kartu ATM maupun penggunaan mesin ATM, dan Desa Taman Sareh adalah dengan predikat sebagai Desa tertinggal.”

Kendala yang lain selain dari pola pikir adalah minimnya pengetahuan teknologi masyarakat RTSM di Desa Taman Sareh. Hal tersebut sudah dibuktikan dari kasus yang terjadi dilapangan bahwa KPM tidak bisa menggunakan ATM maupun mengoperasikan mesin ATM. Kasus tersebut menjadi suatu kendala tersendiri dan menjadi PR bagi pelaksana kebijakan PKH. Dimana Desa Taman Sareh termasuk dalam kelompok Desa tertinggal yang ada di Kabupaten Sampang. Pemberian Pendidikan dan wawasan yang lebih bagi KPM khususnya mengenai Pendidikan teknologi dan informasi sangat dibutuhkan.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Drs. Syamsul Hidayat *op. cit*

5.1.2.3 Penyaluran Dana Bantuan Yang Tidak Merata

Penyebab kendala juga terdapat dari sudut pandang yang lain dimana tidak meratanya pemberian bantuan PKH terhadap masyarakat. Hal tersebut berpengaruh dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah. sesuai yang ditemukan peneliti di lapangan, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sumiyem selaku masyarakat yang tidak menerima bantuan PKH:¹⁰⁵

“Di Desa Taman Sareh ini menurut saya bantuan PKH itu tidak merata masih ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan PKH. Saya sendiri dengan kondisi ekonomi seperti ini tidak mendapatkan bantuan tersebut. Padahal saya sangat membutuhkan dan mengharapkan bantuan dari pemerintah.”

Penyebab masih ada beberapa masyarakat miskin di Desa Taman Sareh diantaranya adalah masih terdapat RTSM yang belum mendapatkan bantuan oleh pemerintah. Tidak meratanya bantuan tersebut akan menimbulkan pertanyaan, dimana masih terdapat penemuan di lapangan bahwa masih ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sehingga pelaksanaan PKH dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Taman Sareh masih terdapat kendala.

5.1.2.4 Tenaga Kerja Pendamping PKH Merangkap Jabatan

Penyebab kendala yang terakhir adalah mengenai kinerja SDM dalam pelaksanaan program. Tenaga kerja pendamping PKH dengan melakukan merangkap jabatan dirasa kinerjanya tidak maksimal, karena fokus dari pekerjaan tersebut akan terbagi. Tenaga kerja pendamping dengan merangkap jabatan adalah

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Sumiyem selaku masyarakat yang tidak menerima bantuan PKH, pada tanggal 29 Juni 2018, pukul: 14.27 WIB

bermaksud untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak.. Seperti yang di ungkapkan oleh Drs. Syamsul Hidayat selaku Kabid Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sampang:

“Tenaga kerja pendamping PKH yang ada disini pada tahun 2017 memang ditemukan terdapat beberapa yang merangkap jabatan. Merangkap jabatan yang dimaksud adalah mereka mempunyai pekerjaan lebih dari satu pekerjaan. Padahal aturannya sudah jelas, bagi pendamping PKH dilarang merangkap jabatan sesuai surat Kementerian Sosial Republik Indonesia tentang kriteria rangkap pekerjaan bagi pegawai kontrak pelaksana PKH di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Kami telah memberikan sanksi dan menyuruh untuk memilih salah satu pekerjaannya, supaya lebih fokus ke satu job saja. Contohnya seperti bapak “x” dia adalah pendamping PKH yang juga sebagai guru honorer di salah satu desa di Kabupaten Sampang, kami memanggil pihak terkait dan menyuruh meninggalkan salah satu pekerjaan tersebut. Apabila masih melakukan pelanggaran tersebut kami bertindak tegas akan memberhentikannya sebagai pendamping PKH.”

Tenaga kerja pendamping atau yang disebut dengan Pendamping PKH yang berada di UPPKH Kabupaten Sampang terdapat beberapa tenaga kerja yang merangkap jabatan. Merangkap jabatan adalah tenaga kerja pendamping yang dimana mempunyai pekerjaan yang lain. Aturan dari Kemensos sudah dijelaskan bahwa bagi pendamping PKH dilarang merangkap jabatan sesuai surat Kementerian Sosial Republik Indonesia No. 249/LJS.JS/BLTB/07/2014 tentang kriteria rangkap pekerjaan bagi pegawai kontrak pelaksana PKH di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Kesuksesan dalam pelaksanaan program tidak luput dari kinerja SDM sendiri. Untuk itu tindak lanjut yang tegas dilakukan adalah sebagai bahan evaluasi kinerja pendamping dalam pelaksanaan program.

5.1.3 Menemukan dan Menciptakan Peluang

Dari kajian tentang menemukan dan menciptakan peluang dapat timbul rancangan suatu kegiatan. Daftar panjang tentang berbagai kegiatan dapat di

susun. Banyak sekali pendekatan yang dapat dilakukan misalnya, dibidang kesehatan, pendidikan, perhubungan, penyediaan air bersih, dan sebagainya. Penyaluran dana PKH untuk membantu masyarakat miskin dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat miskin tersebut.

5.1.3.1 Edukasi Penggunaan Dana Bantuan PKH

Dinas Sosial sebagai instansi dengan Pendamping PKH sebagai edukasi memberikan arahan bagi masyarakat miskin untuk menggunakan dana bantuan yang diberikan kepada msyarakat miskin tersebut agar digunakan semestinya. Seperti untuk Pendidikan anak-anak daripada masyarakat miskin tersebut, untuk kesehatan, serta untuk kebutuhan pokok dari masyarakat penerima bantuan tersebut. Bapak Nanang selaku koordinator PKH menuturkan:¹⁰⁶

“Sebagai pendamping PKH kita memberikan arahan bagi penerima bantuan agar dana bantuan tersebut digunakan sebagaimana mestinya. Sebenarnya dana tersebut diperbolehkan digunkan apa saja bagi penerima bantuan tersebut, sebagai endamping kita melakukan pengarahannya yang lebih tepat untuk digunakan dalam Pendidikan anak-anak masyarakat miskin, kesehatan bagi KPM ibu hamil, balita, maupun Lansia, serta digunakan untuk kebutuhan pokok”.

Pendamping PKH mempunyai tugas dalam pendampingan serta edukasi terhadap KPM dimana dana bantuan yang disalurkan kepada KPM agar digunakan sebagaimana semestinya seperti untuk Pendidikan anak-anak KPM, untuk kesehatan KPM ibu hamil maupun lanjut usia. Dana tersebut diperbolehkan digunakan apa saja bagi KPM, pendamping hanya edukasi agar penggunaan dana bantuan PKH tersebut lebih bermanfaat dalam penggunaannya.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Nanang *op. cit*

5.1.3.2 Sosialisasi PKH Terhadap Masyarakat Desa Taman Sareh oleh LSM

Sosialisasi yang dilakukan oleh LSM sebagai mitra Pemerintah ini adalah bertujuan untuk memberikan bimbingan dan arahan terhadap masyarakat Desa Taman Sareh. Bahwa mereka masyarakat yang kategori adalah meyangand kemiskinan berhak mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah. Serta kriteria yang memenuhi syarat untuk mendapatkan Program Keluarga Harapan. Selain itu juga LSM sebagai penyambung aspirasi masyarakat Desa Taman Sareh. Menampung pendapat masyarakat yang nantinya akan disampaikan kepada Pemerintah. Bentuk sosialisasi tersebut seperti yang diungkapkan oleh Hakim Muhammed selaku LSM Jaringan Kawal Jawa Timur (JakaJatim):¹⁰⁷

“Program Keluarga Harapan adalah Program yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyrakat miskin. Bentuk sosialisasinya yakni mengenalkan kepada masyarakat RTSM mengenai PKH dan Persyaratan mengenai penerima bantuan PKH. Masyarakat Desa Taman Sareh yang dimana termasuk Desa teringgal mayoritas hanya mengetahui bantuan dari pemerintah, tetapi belum mengerti apa sebenarnya PKH tersebut selain itu juga memberikan bimbingan mengenai penggunaan dan PKH yang baik.”

Selain sebagai penyambung aspirasi masyarakat terhadap pemerintah, LSM juga memberikan bimbingan melalui sosialisasi mengenai program PKH dari pemerintah. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat Desa Taman Sareh. Kareana mayoritas Masyarakat RTSM hanya mengetahui ada bantuan dari pemerintah, tetapi tidak mengetahui apa program keluarga harapan tersebut. Selain itu juga memberikan bimbingan bahwasanya dana PKH yang diberikan agar digunakan dengan sebagai mana mestinya.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Hakim Muhammed *op.cit*

5.1.4 Kelayakan Politis

Kelayakan politis bisa dilihat dari faktor penghambat dan pendukung pada jalannya program PKH ini di kabupaten Sampang. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Pada sub ini peneliti akan membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program PKH sesuai dengan analisis yang ditemukan peneliti pada saat dilapangan.

5.1.4.1 Faktor Pendukung Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa

Taman Sareh

Dari hasil temuan peneliti di lapangan faktor pendukung Program Keluarga Harapan (PKH) ini seperti yang dituturkan oleh Ahmad Fauzi selaku pendamping PKH di Desa Taman Sareh yaitu:¹⁰⁸

“Koordinasi yang bagus bisa diciptakan dari pihak perangkat Desa dalam pendampingan masyarakat desa, serta dari segi Pendidikan guru berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak dan melakukan absensi rutin terhadap siswa/siswi dari KPM, kemudian dari segi kesehatan koordinasi baik dengan bidan didesa mengenai pemantauan kondisi kesehatan dan gizi Ibu Hamil serta Balita ketika melakukan posyandu”.

Adanya koordinasi yang baik dari aktor yang terlibat menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan PKH. Aktor tersebut meliputi perangkat Desa sebagai pendamping masyarakat desa, kemudian dari segi bidang Pendidikan guru mempunyai peran dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak dan melakukan absensi rutin agar partisipasi siswa dari keluarga KPM dalam kegiatan belajar mengajar dapat terpantau. Sedangkan di bidang kesehatan yakni koordinasi dengan bidan yang berada di Desa Taman Sareh yang berperan harus selalu

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi *op. cit*

memantau perkembangan kondisi kesehatan dan gizi dari ibu hamil yang berada di Desa Taman Sareh, serta balita ketika melakukan posyandu.

Dengan adanya partisipasi dari pihak-pihak terkait maka Program Keluarga Harapan ini akan berjalan dengan baik. karena itu dukungan dari berbagai aktor inilah yang diharapkan nantinya akan lebih mampu meningkatkan kualitas hidup RTSM. Dukungan tersebut dirasa sangat penting dalam kesuksesan implementasi kebijakan PKH. Selain itu, seperti yang di ungkapkan oleh Nanang selaku Koordinator PKH:¹⁰⁹

“Selain itu faktor pendukung lainnya dalam pelaksanaan PKH ini adalah dukungan finansial yang mencukupi sehingga dapat menentukan kesuksesan tujuan. Dalam pelaksanaan PKH, proses pembayaran atau pendanaan merupakan hal terpenting sebagai penentu keberhasilan.”

Faktor pendukung lainnya adalah dalam pendanaan menjadi hal penting sehingga diperlukan pengelolaan maupun pengawasan yang baik agar dalam pendanaannya sesuai dengan ketentuan untuk itulah dibentuk dengan Koordinator PKH dan pendamping PKH. Oleh karena itu dengan anggaran yang cukup, pelaksanaan program keluarga harapan ini dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya kualitas hidup RTSM sebagai tujuan program dapat meningkat.

¹⁰⁹ wawancara dengan Bapak Nanang *op. cit*

5.1.4.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Taman Sareh

Dalam penemuan peneliti di lapangan selain faktor pendukung juga terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan PKH di Desa Taman Sareh.

Seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Fauzi selaku pendamping PKH:¹¹⁰

“Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan PKH ini yaitu kurang pahamnya KPM terhadap sanksi yang diberikan. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan dana PKH yang tidak semestinya. Pendamping PKH sudah memberikan edukasi tetapi masih terdapat penemuan mengenai salah penggunaan dana bantuan PKH tersebut Misalnya bantuan PKH digunakan untuk kebutuhan pribadi atau kebutuhan sehari-hari”

Faktor penghambat dalam pelaksanaan PKH salah satunya adalah kurang pahamnya sanksi yang diberikan, hal tersebut sudah dibuktikan dengan penggunaan dana PKH yang semestinya digunakan untuk Pendidikan dan Kesehatan melainkan digunakan untuk keperluan pribadi atau kebutuhan sehari-hari. Pendamping PKH harus lebih melakukan pengawasan dan melakukan edukasi ekstra terhadap KPM.

Selain itu bahwa faktor penghambat lain yang ada dalam pelaksanaan PKH di Desa Taman Sareh yaitu terdapat beberapa masyarakat mengenai kurang pahamnya KPM mengenai penggunaan ATM, hal tersebut akan menghambat pelaksanaan PKH dimana bantuan tersebut sudah digunakan sebagai mestinya melainkan harus berkali-kali mendapatkan pendampingan PKH. Hal tersebut dikarenakan masyarakat kebanyakan masih Gaptex karena di Desa Taman Sareh termasuk dalam kelompok Desa Tertinggal. Serta penulis menemukan tidak

¹¹⁰ wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi *op. cit*

adanya mesin ATM di desa tersebut, sehingga KPM susah untuk mengambil uang bantuan tersebut yang dikirim melalui rekening KPM. ATM terdekat berada di sekitar kantor Kecamatan Sampang dan memerlukan waktu sekitar 45 menit dari desa tersebut.



BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada Bab-bab sebelumnya dengan fokus Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui PKH , maka penulis akan menarik kesimpulan yang berupa jawaban atas penggunaan teori pada analisis permasalahan.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis, yang dilakukan peneliti mengenai pengentasan kemiskinan melalui PKH yaitu yang *pertama*, target pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Taman Sareh yaitu terbantunya masyarakat tidak mampu khususnya RTSM dalam memenuhi kebutuhan hidup berkaitan dengan pendidikan anaknya dan kesehatan ibu hamil dan balita.

Kedua, sebagai Kelompok Desa tertinggal, Masyarakat RTSM mayoritas minimnya pengetahuan mengenai Teknologi, hal tersebut dibuktikan dari tidak pahamnya KPM dalam penggunaan ATM. *Ketiga*, Terdapat penemuan mengenai masyarakat miskin yang masih belum menerima bantuan dari pemerintah mengenai PKH tersebut. *Keempat*, Tenaga Kerja Pendamping yang merangkap jabatan atau *double job* menyebabkan kinerja yang tidak maksimal. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh dalam pencapaian pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Sosial.

6.2 Saran

Dari pembahasan di atas dapat ditarik menjadi 4 (empat) saran, yakni tentang Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Progam Keluarga Harapan di Desa Taman Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yakni sebagai berikut :

1. Peningkatan Koordinasi Dinas Sosial Kabupaten Sampang Dengan LSM

Permasalahan kemiskinan merupakan sebuah permasalahan kesejahteraan sosial, sehingga membutuhkan penanganan yang *hollistic*, untuk itulah dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik antara *stakeholders*. Untuk membuat kebijakan yang terkait dengan permasalahan kemiskinan, sudah sepantasnya pemerintah bekerjasama dengan pihak-pihak yang mendampingi KPM tersebut, yang bersentuhan langsung dengan mereka, agar kebijakannya tepat sasaran. Selain itu dalam pelaksanaan kebijakan, koordinasi antar *stakeholders* juga harus tetap dijaga, dalam hal ini Dinas Sosial sebagai dinas yang menangani permasalahan-permasalahan sosial, dan LSM-LSM peduli penyandang kemiskinan, harus mempunyai visi yang sejalan. Di Desa Taman Sareh LSM hanya sebagai pendamping KPM hanya penyambung lidah masyarakat.

2. Pembuatan Kebijakan yang lebih Khusus Mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kemiskinan.

Penanganan kemiskinan jika dimasukkan dalam kebijakan PMKS masih terlalu umum, sehingga tidak mengherankan jika kebijakan ini belum mampu memberikan dampak positif bagi para RTSM, kebijakan yang lebih khusus bertujuan untuk penanganan RTSM yang lebih fokus. Karena kita mengetahui

sendiri bagaimana kehidupan Masyarakat RTSM sangatlah jauh berbeda dengan masyarakat normal pada umumnya. Untuk itu sebaiknya pemerintah Kabupaten sampang sebaiknya membuat kebijakan lebih khusus mengenai penanganan Kemiskinan.

3. Dinas Sosial Seharusnya Lebih Berperan Penting Dalam Menangani Permasalahan Kemiskinan

Dengan instansi dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Sampang yang bergerak di bidang sosial, seharusnya Dinas Sosial menjadi pelaku utama dalam penanganan Kemiskinan di Desa Taman Sareh Kabupaten Sampang. Hal tersebut dikarenakan pendamping PKH yang dipekerjakan sebagai tenaga kerja non PNS jelas mempunyai kemampuan dan Pendidikan yang berbeda dari tenaga kerja PNS. Sesuai dari kesimpulan bahwa tidak sedikit apabila masyarakat Desa Taman Sareh yang masih kurang pahamnya mengenai teknologi dan masih terdapat penemuan penyalahgunaan dana bantuan tersebut. Pendampingan PKH harus lebih ditingkatkan kinerjanya.

4. Peningkatan SDM Dalam Pelaksanaan PKH

Peningkatan SDM sangat penting dalam pelaksanaan program. Hal tersebut dikarenakan untuk peningkatan kinerja SDM yang tentunya akan menghasilkan pelaksanaan program sesuai dengan harapan. Untuk itu permasalahan yang terdapat dari merangkap jabatan sampai dengan kurangnya pengawasan kinerja pendamping dalam pelaksanaan PKH menjadi bahan evaluasi agar kinerjanya lebih baik kedepanya. Dinas Sosial harus terus berbenah dalam mengatasi permasalahan sosial yang ada Di Taman Sareh. Karena permasalahan

kesejahteraan sosial yang belum terselesaikan adalah tugas Dinas Sosial yang bergerak di Bidang Sosial.

